



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024



BerAKHLAK
bangga
melayani
bangsa

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ini adalah perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama(IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang membutuhkan sekaligus diharapkan menjadi penyempurnaan dokumen perencanaan serta penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di

masa yang akan datang. Hal ini juga merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, yang diharapkan dapat memperoleh kepercayaan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.



Malili, 19 Maret 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur	1
	B. Posisi Strategis Kabupaten Luwu Timur	3
	C. Isu-isu Strategis Kabupaten Luwu Timur	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	6
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. PENGUKURAN KINERJA	15
	B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
	1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	
	2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	
	3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah	

4.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	
5.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
6.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan	
C.	REALISASI ANGGARAN	136
D.	CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN	139
BAB IV	PENUTUP	
A.	SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA	143
B.	LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA	144
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu bagian dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur adalah Kabupaten yang terletak di ujung timur Propinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan :

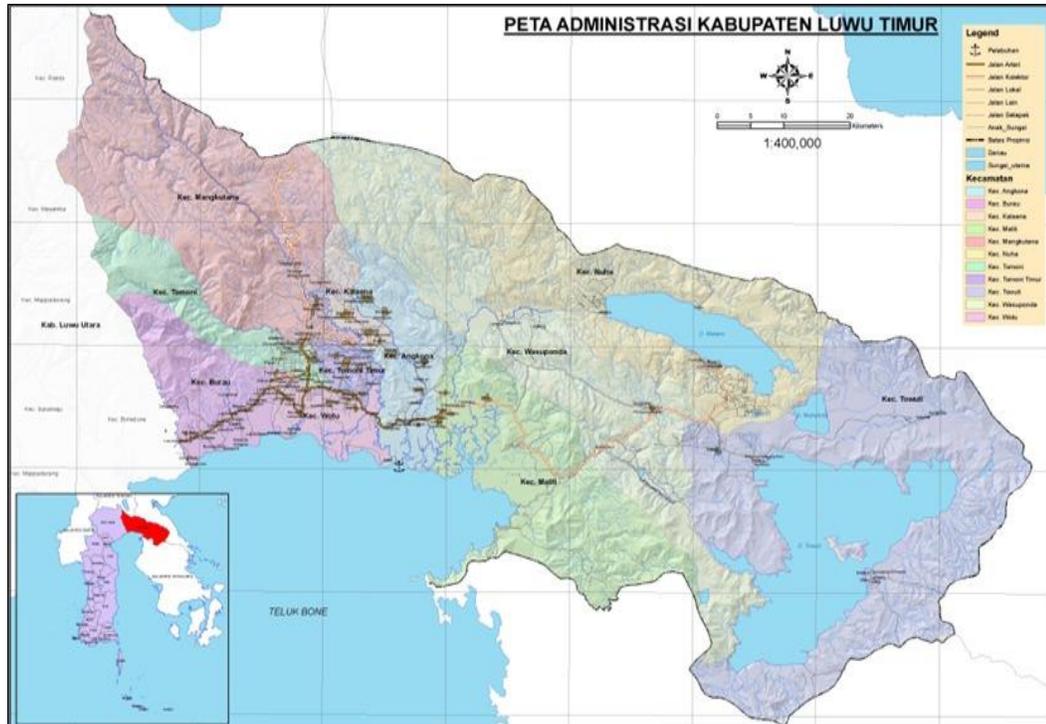
- Sebelah Utara : Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah Timur : Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kendari dan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone.
- Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Geografis

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak diantara 2^o03'00" sampai dengan 3^o03'25" Lintang Selatan dan 119^o28'56" sampai dengan 121^o47'27" Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada pada kawasan Pegunungan Verbeck, namun di beberapa tempat merupakan daerah pedataran dan rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung berada dibagian utara dan barat sedangkan wilayah pedataran berada dibagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dan yang terluas berada di Kecamatan Angkona, Kecamatan Bura, Kecamatan Wotu, Kecamatan Malili dan Kecamatan Mangkutana. Sedangkan kondisi berbukit dan bergunung yang terluas berada di Kecamatan Nuha, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, memiliki luas wilayah 6.944,88 km² atau 11,14 % luas Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 11 kecamatan, 124 desa dan 3 kelurahan. Kabupaten Luwu Timur berada pada ketinggian 0 - 1.230 m diatas permukaan laut dengan struktur wilayah terdiri atas dataran rendah, tinggi dan wilayah pesisir. Kondisi topografi dan kelerengan berada pada kisaran 0 – 2%, 2 – 15%, 15 – 30%, 30 – 40% dan > 40%.

Kabupaten Luwu Timur sebagaimana daerah tropis lainnya, mempunyai suhu berkisar antara 22,5°C – 33,6°C, termasuk dalam tipe iklim A (*Schmidt – Ferguson*), dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2014 tercatat rata-rata curah hujan mencapai 300 mm dengan rata-rata jumlah hujan perbulan mencapai 16 hari.



Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 adalah 323.422 ribu jiwa yang terdiri dari 166.934 jiwa laki-laki dan 156.488. Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sebesar 312,94 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Mangkutana sebesar 17,28 jiwa/km².

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah perangkat daerah sebanyak 41.

Di samping Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terdapat pula kelompok 3 (tiga) Jabatan Struktural Staf Ahli yakni, 1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, 2) Staf Ahli Bidang Pembangunan, 3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Kepegawaian

Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024 yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3.675 orang, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerjasama (P3K) sebanyak 1.611. Jika diamati menurut golongan kepangkatan, jumlah pegawai golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 256 orang, golongan III sebesar 2488 orang, dan golongan IV sebanyak 928 orang pegawai, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 1296 orang dan Pegawai Perempuan sebanyak 2380 orang.

B. POSISI STRATEGIS KABUPATEN LUWU TIMUR

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan penyusunan kembali terhadap Dokumen RPJMD untuk periode Bupati terpilih 2022-2026 yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2022-2026, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan Nasional.

RPJMD daerah disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat,

terutama untuk lebih memantapkan pencapaian Visi Pemerintah Daerah yakni “Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”.

Dalam rumusan visi terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Kata kunci tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

Berkelanjutan adalah mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran bahwa apa yang baik dimasa lalu dapat diteruskan ke masa depan, kemudian apa yang buruk di masa lalu hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan.

Lebih Maju adalah bahwa apa yang akan dilakukan kedepan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang baik dimasa lalu tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya adalah bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tersebut dijabarkan kedalam misi sebagai upaya-upaya umum dalam pencapaian visi yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

C. ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN LUWU TIMUR

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan urusan, Isu Global, Isu Nasional dan Isu Provinsi tersebut, maka prioritas isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2022-2026 dapat diuraikan. Prioritas ini disusun dengan menggunakan kriteria kesesuaian dengan visi-misi Kepala Daerah, tingkat kompleksitas dan kegentingan masalah, tingkat kemendesakan masalah untuk diatasi, dan kriteria lainnya. Uraian isu strategis tersebut dinyatakan dalam bentuk poin isu, dengan alasan bahwa penjelasan berbagai aspek atas isu-isu tersebut telah diuraikan pada identifikasi permasalahan, isu global, isu nasional, dan isu propinsi. Adapun daftar prioritas isu strategis daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan;
3. Meningkatnya pemberdayaan gender;
4. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah;
5. Ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha;
6. Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah;
7. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
10. Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat;
11. Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Dalam RPJMD 2021-2026 disebutkan VISI Kabupaten Luwu Timur adalah: ***“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”***, dengan misi:

1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh.
2. Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas.
3. Menyediakan Infrastruktur Daerah Yang Memadai dan Lingkungan Yang Berkualitas.
4. Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik.
5. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Seluruh Warga Masyarakat.
6. Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Yang Berbasis Pada Agama dan Budaya

Selanjutnya, dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2026, yaitu

1. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketentraman
6. Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada akhir periode RPJMD 2026. Adapun tujuan, Sasaran

Strategis, Indikator Kinerja, serta Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Matriks Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026

No.	Misi	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I.	Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh	1.	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75
		2.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun	Mandiri
		3.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	92,15
II.	Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas	4.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	2,23
		5.	Ketersediaan lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,30
III.	Menyediakan Infrastruktur Daerah Yang Memadai dan Lingkungan Yang Berkualitas	6.	Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	75,59
		7.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	88,70

				Indeks Resiko Bencana	202 (tinggi)
IV.	Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik	8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	A (Baik)
				Nilai SAKIP Daerah	A
		9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Pelayanan SPM	90
				IKM Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	88,32
V.	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Seluruh Warga Masyarakat	10.	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	77,90
VI.	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Yang Berbasis Pada Agama dan Budaya	11.	Meningkatnya Penerapan Nilai-nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan	Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat	95
				Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat	95

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya, dimana dari 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja tujuan/sasaran yang tertuang dalam IKU 2022-2026, diperjanjikan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja untuk dilaksanakan guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Bupati Luwu Timur Tahun 2024 merupakan rangkuman dari penetapan kinerja dari beberapa perangkat daerah yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang indikator kinerja utamanya ditentukan dari penyesuaian atau pemetaan terhadap sasaran strategis Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan perjanjian kinerja tiap –tiap SKPD yang telah di tandatangani antara Pihak pertama dengan Kepala OPD yang bersangkutan akan dikembalikan ke masing-masing OPD untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No.	Misi	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I.	Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh	1.	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,24
		2.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun	Maju (0,7816)

		3.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	55,50
II.	Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas	4.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	2,08
		5.	Ketersediaan lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,80
III.	Menyediakan Infrastruktur Daerah Yang Memadai dan Lingkungan Yang Berkualitas	6.	Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	84,40
		7.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	88,35
				Indeks Resiko Bencana	152 (tinggi)
IV.	Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik	8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	A (Baik)
				Nilai SAKIP Daerah	BB (70,01)
		9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Pelayanan SPM	98,55
				IKM Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	88

V.	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Seluruh Warga Masyarakat	10.	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	85,56
----	---	-----	---	-----------------------------------	-------

C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkan RKA tahun 2024, yang terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) program sebagai berikut:

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	114.376.988.181
Program Pengelolaan Pendidikan	116.909.321.563
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	8.164.968.808
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.467.719.000
Program Penataan Desa	28.557.446
Program Administrasi Pemerintahan Desa	834.726.324
Program Rehabilitasi Sosial	1.070.972.955
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	307.148.371
Program Perlindungan Perempuan	1.020.880.616
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	40.774.800
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	604.527.000
Program Pengembangan UMKM	384.540.200
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	21.107.898.400
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	645.883.156

Program Pengembangan Ekspor	333.337.443
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.153.675.800
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	671.330.000
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	680.356.450
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	22.923.409.042
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	25.079.489.526
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	878.240.703
Program Penyuluhan Pertanian	4.850.093.700
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.627.026.200
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	12.427.617.800
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.574.909.500
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif	215.490.000
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.763.611.350
Program Pemasaran Pariwisata	1.175.460.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	297.398.700
Program Promosi Penanaman Modal	742.131.970
Program Pelayanan Penanaman Modal	340.309.450
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	472.532.000
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.755.226.900
Program Penempatan Kerja	338.231.150
Program Hubungan Industrial	532.988.800
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	13.664.213.200
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.816.870.413

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	212.914.000
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	16.241.964.000
Program Pengembangan Permukiman	5.171.563.322
Program Penataan Bangunan Gedung	46.165.250.249
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	9.699.317.670
Program Penyelenggaraan Jalan	98.257.103.515
Program Pengembangan Perumahan	1.820.090.500
Program Kawasan Permukiman	4.912.828.690
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	18.666.068.736
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	395.036.690
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	682.594.575
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	177.547.810
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	44.804.010
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	97.425.000
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	26.759.950
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	70.044.950
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	57.488.000
Program Pengelolaan Persampahan	3.974.093.830
Program Penanggulangan Bencana	1.335.990.030
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.934.364.300
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.455.300.300
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.233.180.000

Program Pengelolaan Keuangan Daerah	363.440.422.447
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.861.629.286
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.573.530.400
Program Penataan Organisasi	1.117.305.600
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.871.226.241
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Nasional	1.503.346.450
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	44.546.696.900
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	45.289.900
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.443.471.470
Jumlah	1.027.281.506.738

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah laporan akhir yang memuat pertanggungjawaban kinerja yang dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur atas pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2024 dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan pencapaian tahun keempat RPJMD Periode 2021-2026. Dalam penyusunan LAKIP ini dimulai dari pengumpulan data dan pemilahan data dari setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang disatukan dan diperiksa ulang secara seksama, sehingga menghasilkan suatu ikhtisar mengenai hasil capaian kinerja seluruh perangkat daerah yang menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pencapaian sasaran kinerja diperoleh dengan membandingkan target yang ditetapkan setiap tahun dengan realisasi target pada indikator sasaran kinerja. Ada 2 (dua) cara yang digunakan dalam membandingkan yaitu, *pertama* apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, yang *kedua* apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, telah menetapkan 11(sebelas) sasaran dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 3.1
PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,24	76,44	100,26
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan berkelanjutan	2. Indeks Desa Membangun (IDM)	Maju (0,7816)	Maju (0,7680)	98,26
3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,50	53,38**	96,18
4	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	4. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	2,08	3,25	156,25
5	Ketersediaan lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha	5. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,80	4,58	61
6	Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	6. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	84,40	88,34	104,67
7	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	88,35	77,93	88,21
		8. Indeks Resiko Bencana	152 (tinggi)	133,38 (sedang)	114
8.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	9. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	BB (70,01)	BB(75,46)	107,78
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	A	A (80,4112)**	100
		11. Nilai SAKIP Daerah	BB (71,00)	B (67,77)	96,80
10.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	12. IKM Pelayanan SPM	98,55	99,13**	100,59
		13. IKM Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	88	87,86	99,84%

11.	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat	14.	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	85,56	88,59	103,54%
-----	---	-----	-----------------------------------	-------	-------	---------

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Hingga Akhir Tahun 2024 yang merupakan Tahun Keempat RPJMD 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan visi misi dan tujuan melalui 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam IKU Tahun 2022-2026. Selanjutnya ditetapkan 15 Sektor dan Program Prioritas dengan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024. Adapun hasil pengukuran kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

Misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh”** dengan tujuan **“Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat ”**. Untuk mencapai misi 1, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang didukung secara terpadu oleh urusan Kesehatan, Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial.

Sasaran Strategis 1

Meningkatkan Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA YANG BEDAYA SAING* ” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,24	76,44	100,26%
Rata-Rata Capaian Kinerja			100,26%		

A. Indikator Kinerja **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022, formulasi cara memperoleh nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut :

RUMUS			
$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$			
Dimana:			
$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}(\text{indeks melek huruf}) + \frac{1}{3}(\text{indeks rata rata lama sekolah})$ $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak Indeks $X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)min}}{[X_{(i)maks} - X_{(i)min}]}$			
Dimana:			
$X_{(1)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$ $X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$			
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM			
Indikator Komponen IPM (=X(i))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 ^{a)}	300.000 ^{b)}	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ditargetkan sebesar 76,24, adapun realisasi kinerja dari target berada pada angka 76,44 dengan capaian kinerja 100,26%. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Capaian IPM Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2024 meningkat 0,60 poin (0,79 persen) dibandingkan dengan IPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 yang berada pada angka 75,84.

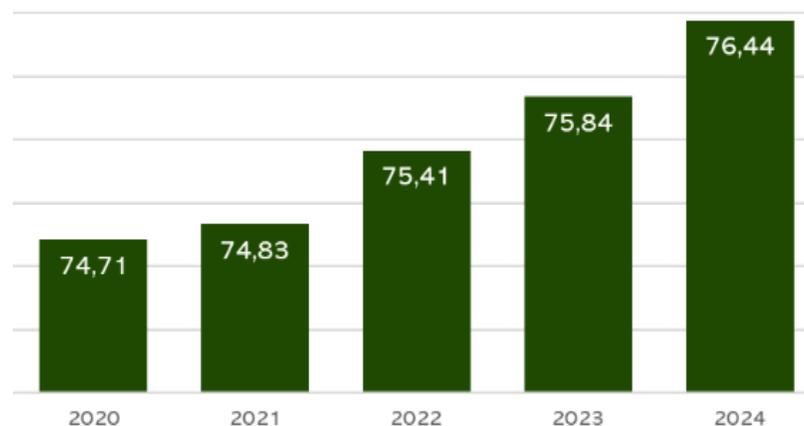
Selama periode 2020-2024, IPM Luwu Timur rata-rata meningkat sebesar 0,57 persen per tahun. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi pembentuk, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak. Pertumbuhan IPM tahun 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya dimana dimensi pengetahuan dan standar hidup layak mengalami percepatan, sedangkan perlambatan pertumbuhan terjadi pada dimensi umur panjang dan hidup sehat. Bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,55 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7

tahun meningkat 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya , dari 13,01 tahun menjadi 13,18 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun keatas meningkat 0,01 tahun, dari 8,93 tahun menjadi 8,94 tahun pada 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil perkapita per tahun yang disesuaikan meningkat 416 ribu rupiah (3,09 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pembangunan yaitu untuk memperoleh akses akan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dengan kemudian melakukan revisi pada metode penghitungan di tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010. IPM merupakan indicator yang digunakan untuk melihat perkembangan pencapaian pembangunan dalam jangka panjang, tetapi pada perkembangannya dapat menjadi rujukan untuk jangka pendek dan menengah. Sebagai indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, ada dua aspek yang biasa diperhatikan dalam menilai IPM, yaitu kecepatan dan status pencapaian IPM.

Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1. Adapun grafik pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur periode 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Luwu Timur (tahun), 2020–2024

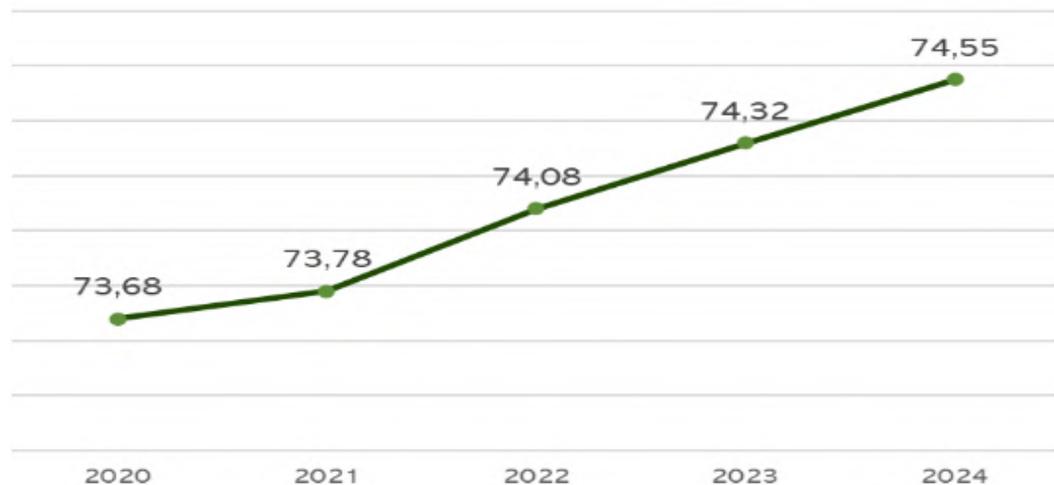
(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024)

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Luwu Timur menurut dimensi penyusunnya, 2020-2024

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,68	73,78	74,08	74,32	74,55
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,83	12,84	13,00	13,01	13,18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,80	8,81	8,92	8,93	8,94
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	12.814	12.886	13.058	13.451	13.867
IPM		74,71	74,83	75,41	75,84	76,44

A. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (Angka Harapan Hidup)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,87 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,29 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Luwu Timur adalah 73,68 tahun, dan pada tahun 2024 mencapai 74,55 tahun. Jika dibanding dengan tahun 2023 UHH 2024 meningkat 0,23 tahun (0,31 persen) dan mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan di tahun 2023 yang meningkat 0,32 persen (0,24 tahun). Adapun perkembangan angka harapan hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

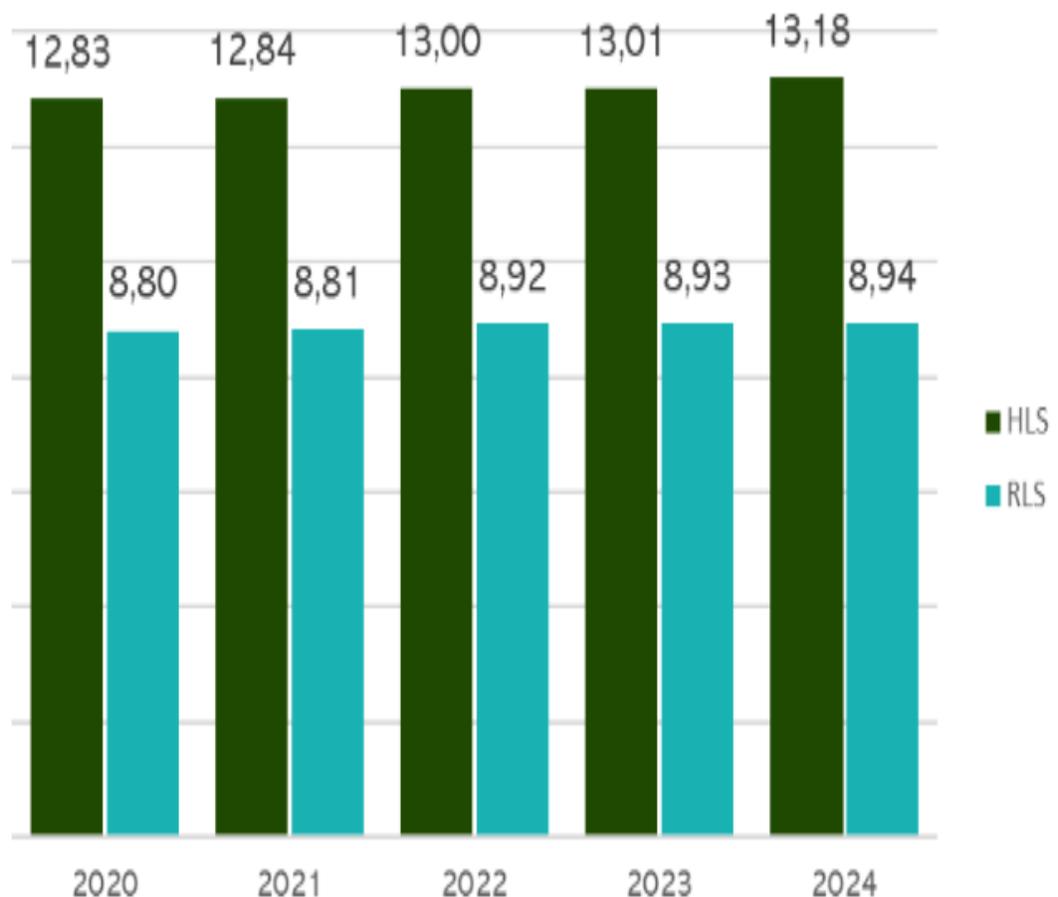


Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Luwu Timur, 2020-2024

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024)

B. Dimensi Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama Sekolah)

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Luwu Timur rata-rata meningkat 0,68 persen per tahun sementara RLS meningkat 0,40 persen per tahun. HLS dan RLS Luwu Timur 2024 meningkat 0,17 (1,31 persen) dibandingkan tahun 2023, sementara RLS Luwu Timur Tahun 2024 meningkat 0,01 tahun (0,11 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun perkembangan capaian angka rata-rata lam sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

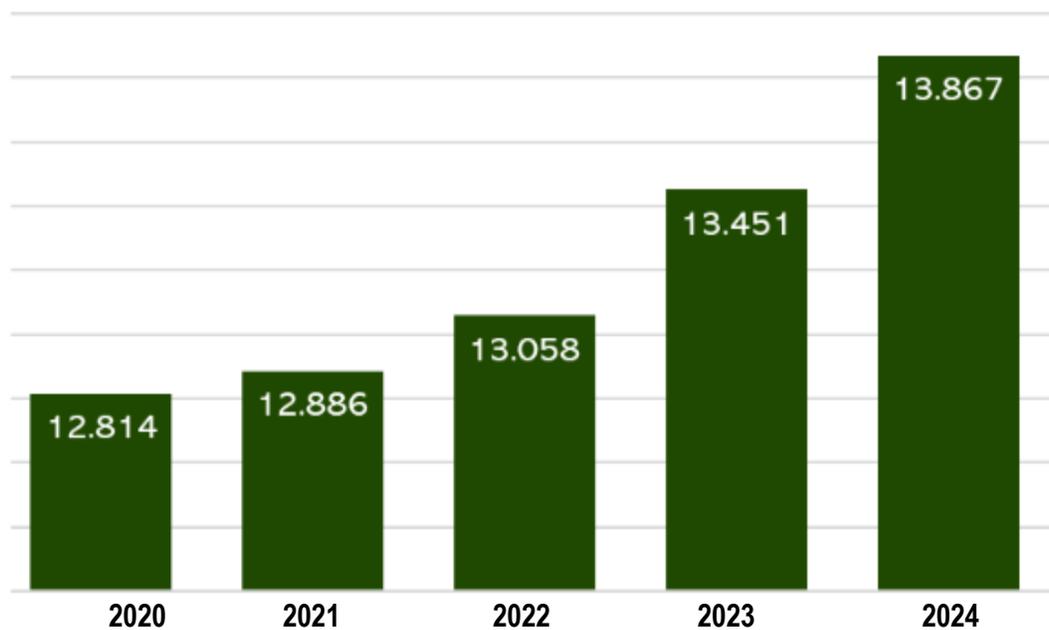


Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Luwu Timur, 2020-2024

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024)

C. Dimensi Standar Layak Hidup

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Pada 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun disesuaikan masyarakat Luwu Timur mencapai Rp 13,867 juta per tahun. Capaian ini meningkat 416 ribu rupiah (3,09 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 1,64 persen per tahun. Adapun perkembangan standar hidup layak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



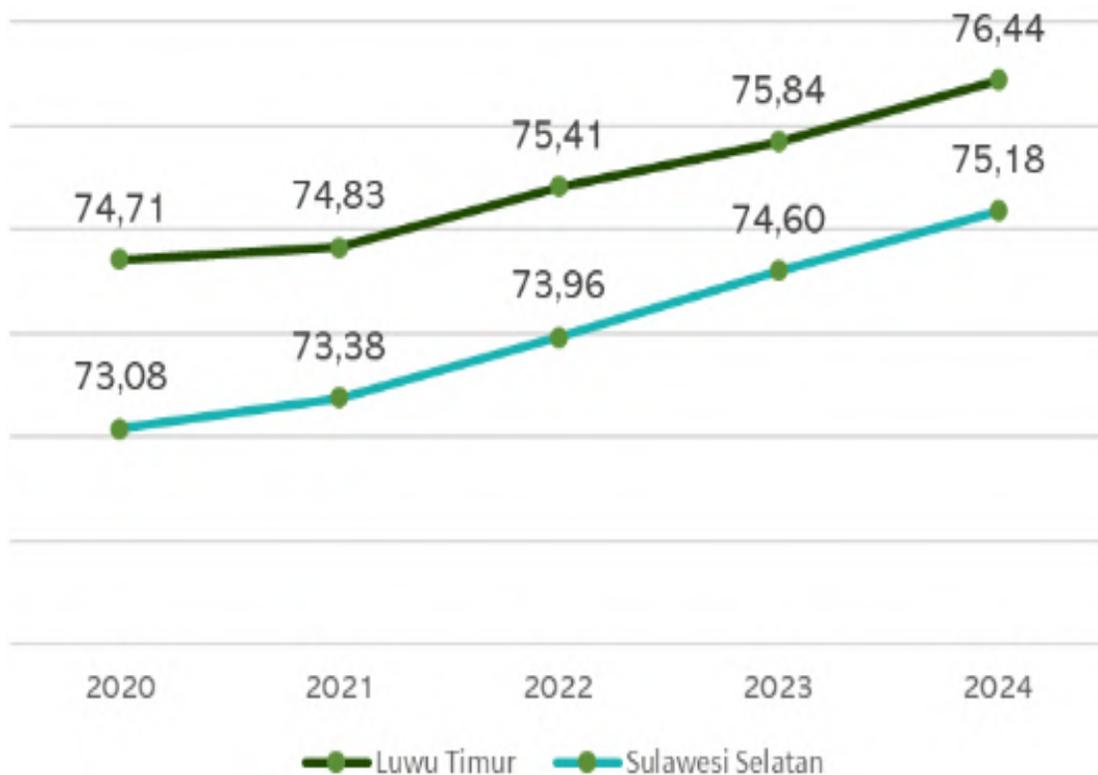
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (PPP) (Rp.000) 2020-2024

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025)

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Provinsi Selatan

Selama 2020-2024, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari nilai IPM Kabupaten Luwu Timur yang lebih tinggi dari nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, nilai IPM Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi (76,44) dibanding nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan (75,18). Tingginya pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur tidak lepas dari pencapaian komponen indikator pembentuk IPM. Komponen IPM Luwu Timur yang lebih tinggi dibandingkan komponen IPM Sulawesi Selatan diantaranya Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari besaran pengeluaran perkapita per tahun. Sejak tahun 2020 hingga 2024, status pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur berstatus “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$).

Gambar Perbandingan IPM Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024



Perbandingan IPM Kab. Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Komponen Pembentuk Tahun 2024

Komponen	Satuan	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur Panjang dan Hidup Sehat			
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,55	73,83
Pengetahuan			
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,18	13,55
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,94	8,86
Standar Hidup Layak			
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	13.867	12.275
IPM		76,44	75,18

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur 2025)

IPM dan Komponen IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan, 2021-2024

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (ribu Rupiah)		IPM	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kepulauan Selayar	72,77	73,05	12,66	12,67	8,08	8,09	9.060	9.446	69,68	70,27
Bulukumba	73,25	73,67	13,41	13,42	7,82	8,01	10.632	10.941	72,02	72,75
Bantaeng	72,20	72,46	12,05	12,30	6,77	6,81	11.829	12.133	69,71	70,41
Jeneponto	73,23	73,60	12,10	12,11	6,60	6,75	9.215	9.425	67,54	68,13
Takalar	72,81	73,16	12,42	12,48	7,49	7,64	10.543	10.746	70,25	70,86
Gowa	73,63	73,86	13,65	13,66	8,20	8,40	9.504	9.812	71,74	72,44
Sinjai	72,30	72,60	13,06	13,25	7,78	7,79	9.505	9.726	70,02	70,60
Maros	73,15	73,38	13,16	13,30	8,01	8,02	11.032	11.403	72,32	72,92
Pangkajene dan Kepulauan	72,25	72,62	12,77	12,78	7,92	8,05	11.519	11.817	71,81	72,41
Barru	72,10	72,37	13,59	13,61	8,24	8,25	11.017	11.275	72,56	72,96
Bone	72,54	72,91	12,98	12,99	7,23	7,36	9.030	9.277	68,81	69,43
Soppeng	72,78	73,17	13,05	13,20	7,82	7,96	9.558	9.756	70,33	71,05
Wajo	72,62	72,97	13,15	13,30	7,05	7,16	12.505	12.729	72,05	72,69
Sidenreng Rappang	74,00	74,17	12,95	13,01	7,94	8,04	12.201	12.379	73,39	73,81
Pinrang	74,09	74,29	13,24	13,25	7,87	8,04	11.956	12.102	73,46	73,90
Enrekang	73,53	73,76	13,71	13,86	8,91	8,93	10.973	11.183	74,13	74,61
Luwu	72,76	73,06	13,39	13,40	8,35	8,48	10.116	10.308	71,92	72,42
Tana Toraja	74,08	74,38	13,86	13,87	8,51	8,52	7.434	7.584	69,78	70,16
Luwu Utara	72,89	73,24	12,57	12,58	7,86	7,87	11.736	12.105	71,99	72,48
Luwu Timur	73,78	74,08	12,84	13,00	8,81	8,92	12.886	13.058	74,83	75,41
Toraja Utara	74,50	74,72	13,39	13,41	8,25	8,26	8.134	8.494	70,22	70,83
Kota Makassar	74,71	74,96	15,58	15,59	11,43	11,55	17.097	17.406	84,00	84,45
Kota Parepare	74,01	74,25	14,51	14,52	10,65	10,66	13.786	14.027	79,56	79,87
Kota Palopo	73,57	73,81	15,09	15,10	10,94	11,09	13.117	13.404	79,72	80,24
SULAWESI SELATAN	73,11	73,40	13,52	13,53	8,46	8,63	11.184	11.430	73,38	73,96

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN LUWU TIMUR 2024



Berita Resmi Statistik No. 14/12/7325/Th. VI, 19 Desember 2024



- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Untuk capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan realisasi indikator kinerja tahun keempat yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026, dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	2020	74,71	-
		2021	74,83	-
		2022	75,41	102,18%
		2023	75,84	102,35%
		2024	76,44	100,26

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi								
1.	Indeks Pembangunan Manusia	73,80	75,41	74,10	75,84	76,24	76,44	77,58	-	78,00	-

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Standar Nasional.**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
	Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	Standar Nasional
Indeks Pembangunan Manusia	76,44	75,19	75,02

IPM tingkat Nasional tahun 2024 mencapai 75,02 meningkat 0,63 poin (0,85 persen) dibandingkan tahun 2023 dengan nilai 74,39, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan IPM tingkat Nasional dan menempati peringkat ke 4 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, berada dibawah Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota Pare-Pare. Selama periode 2020-2024 angka IPM Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selalu mengalami peningkatan, selain itu juga selalu berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun IPM dan Komponen IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (ribu Rupiah)		IPM	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kepulauan Selayar	73,27	73,48	12,69	12,84	8,35	8,49	9.830	10.235	71,13	71,98
Bulukumba	74,01	74,18	13,43	13,45	8,26	8,52	11.392	11.807	73,64	74,43
Bantaeng	72,67	72,85	12,53	12,79	7,09	7,26	12.304	12.719	71,28	72,20
Jeneponto	73,81	74,00	12,12	12,14	7,00	7,01	9.781	10.158	68,95	69,45
Takalar	73,43	73,69	12,49	12,50	7,66	7,73	11.239	11.679	71,46	72,06
Gowa	74,03	74,19	13,70	13,71	8,41	8,53	10.233	10.700	73,01	73,71
Sinjai	72,83	73,04	13,26	13,27	7,80	7,82	10.180	10.665	71,20	71,81
Maros	73,55	73,77	13,50	13,51	8,03	8,05	11.795	12.209	73,56	74,04
Pangkajene dan Kepulauan	72,87	73,11	12,80	12,81	8,31	8,47	12.241	12.643	73,23	73,87
Barru	72,57	72,75	13,62	13,63	8,54	8,80	11.712	12.058	73,80	74,51
Bone	73,20	73,46	13,00	13,02	7,54	7,55	9.682	10.084	70,25	70,81
Soppeng	73,47	73,77	13,21	13,22	8,27	8,45	10.098	10.547	71,94	72,76
Wajo	73,25	73,47	13,31	13,32	7,45	7,46	13.192	13.608	73,56	73,98
Sidenreng Rappang	74,32	74,45	13,02	13,03	8,20	8,21	12.739	13.209	74,38	74,81
Pinrang	74,47	74,63	13,27	13,28	8,30	8,53	12.559	13.010	74,70	75,43
Enrekang	73,92	74,07	13,87	13,88	8,94	9,11	11.636	12.138	75,11	75,83
Luwu	73,30	73,52	13,41	13,43	8,73	8,81	10.691	11.121	73,23	73,86
Tana Toraja	74,63	74,85	13,88	14,10	8,60	8,77	8.017	8.319	71,01	71,94
Luwu Utara	73,56	73,87	12,59	12,61	8,14	8,37	12.513	12.866	73,31	74,04
Luwu Timur	74,32	74,55	13,01	13,18	8,93	8,94	13.451	13.867	75,84	76,44
Toraja Utara	74,88	75,03	13,42	13,43	8,51	8,54	8.871	9.292	71,69	72,31
Kota Makassar	75,15	75,33	15,61	15,62	11,56	11,57	17.889	18.386	84,85	85,23
Kota Parepare	74,44	74,63	14,54	14,55	10,70	10,88	14.495	14.928	80,36	80,97
Kota Palopo	74,00	74,19	15,12	15,13	11,13	11,16	13.892	14.369	80,77	81,25
SULAWESI SELATAN	73,63	73,83	13,54	13,55	8,76	8,86	11.841	12.275	74,60	75,18

Catatan :

UHH : Umur Harapan Hidup dari Hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Peningkatan umur harapan hidup saat lahir :
 - Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan kematian bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan seperti peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita;
 - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
 - Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular
 - Perbaikan kesehatan lingkungan;
 - Meningkatkan upaya pencegahan kematian bayi dan balita dengan imunisasi, pencegahan stunting, pencegahan penyakit menular;
 - Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui program UHC (universal Health coverate);
 - Memperbaiki status kesehatan gizi masyarakat.
 - Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga sehat;
 - Peningkatan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - Optimalisasi promosi kesehatan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
 - ketersediaan obat dan alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan.
- Peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
 - Pendidikan secara gratis kepada siswa berupa pemberian bantuan operasional sekolah dan perlengkapan sekolah gratis SD dan SMP.
 - Perbaikan aksesibilitas pendidikan dengan ketersediaan sekolah yang layak dengan melakukan pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi terhadap sekolah-sekolah yang rusak serta meningkatkan infrastruktur pendidikan dengan menyediakan transportasi antar jemput sekolah.
- Standar Layak Hidup
 - Perbaikan Penghasilan/penerimaan yang semakin wajar.

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan :**

- ✓ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat:
 - ✓ Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya;
 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;
 - Pengembangan Puskesmas;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
 - Pengadaan Obat, Vaksin;
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai;
 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.
 - ✓ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya;
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus;
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
- Operasional Pelayanan Puskesmas;
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria.
- ✓ Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman:
 - ✓ Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan:
 - ✓ Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.
- ✓ Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:
 - ✓ Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
- Program Pengelolaan Pendidikan:
 - ✓ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar :
 - Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru;
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 - Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah;
 - Pembangunan Rumah Dinas/Guru/Penjaga Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sekolah;
 - Pengadaan Mebel Sekolah;
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa;
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah;
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;

- Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- Pembangunan Ruang Kelas Baru
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 - Pembangunan Laboratorium;
 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
 - Pengadaan Mebel Sekolah;
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa;
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru;
 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - .Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
 - Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;
 - Pengadaan Mebel PAUD;
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD;
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD;
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD;
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD;
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD;
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru;
 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Non Formal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar Rp.369.454.101.283 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.356.607.821.190 atau 96,52% dan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini sebesar 3,48%. Artinya tingkat daya serap penggunaan anggaran yang digunakan cukup tinggi dan dengan realisasi kinerja yang tercapai secara signifikan bahkan melebihi target.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN DESA YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN* ” dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Desa Membangun	Status	Maju (0,7816)	Maju (0,7680)	98,26%
Rata-Rata Capaian Kinerja			98,26%		

A. Indikator Kinerja “*Indeks Desa Membangun*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh status Indeks Desa Membangun adalah :

$$\mathbf{IDM} = \frac{\mathbf{IKS + IKE + IKL}}{\mathbf{3}}$$

Keterangan:

IKS: Indeks Ketahanan Sosial

IKE: Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL: Indeks Ketahanan Lingkungan

$$\mathbf{IDM} = \frac{\mathbf{0,8438 + 0,6817 + 0,7786}}{\mathbf{3}}$$

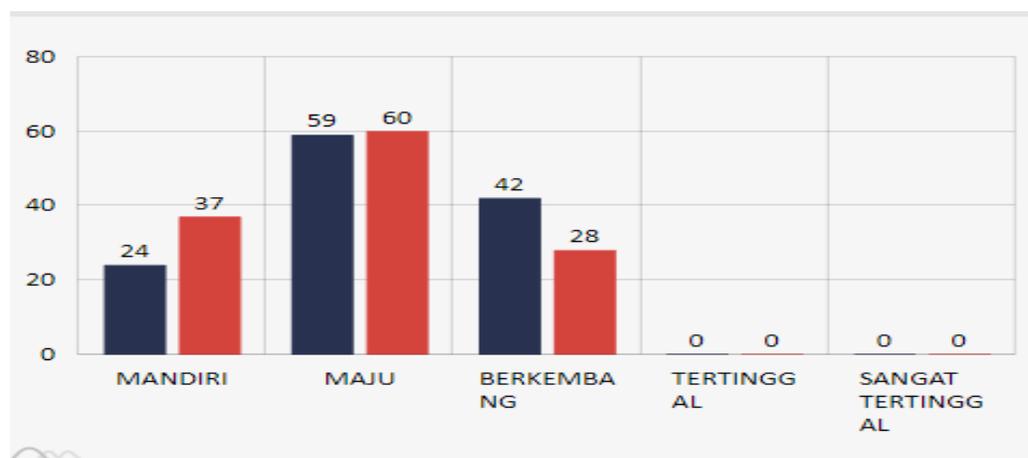
$$\mathbf{IDM} = \mathbf{0,7680}$$

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan *ambang batas* sebagai berikut :

1. Desa Sangat Tertinggal : $\mathbf{IDM} \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $\mathbf{0,4907 < IDM} \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang : $\mathbf{0,5989 < IDM} \leq 0,7072$
4. **Desa Maju** : $\mathbf{0,7072 < IDM} \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $\mathbf{IDM} > 0,8155$

Untuk indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dengan target kinerja tahunan yaitu status desa MAJU (0,7816), dan realisasi capaian kinerja adalah status Desa MAJU (0,7680), dengan persentase capaian Kinerja 98,26 %.. Jika dilihat tabel perkembangan desa menurut status menunjukkan bahwa terjadi peningkatan masing-masing status desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



(sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025)

Tabel Perbandingan Status IDM Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024

	2023		2024	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
MANDIRI	24	19.20%	37	29.60%
MAJU	59	47.20%	60	48.00%
BERKEMBANG	42	33.60%	28	22.40%
TERTINGGAL	0	0.00%	0	0.00%
SANGAT TERTINGGAL	0	0.00%	0	0.00%

(sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan

Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

**TABEL PERUBAHAN STATUS DESA
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
TAHUN 2024**

No.	Kode Desa	Nama Desa	Nama Kec	Nilai IDM Tahun 2024	Status Desa
1	7324012001	MALEKU	MANGKUTANA	0,7871	MAJU
2	7324012002	WONOREJO	MANGKUTANA	0,8762	MANDIRI
3	7324012003	MARGOLEMBO	MANGKUTANA	0,7335	MAJU
4	7324012004	TEROMU	MANGKUTANA	0,7356	MAJU
5	7324012007	MANGGALA	MANGKUTANA	0,7103	MAJU
6	7324012009	KASINTUWU	MANGKUTANA	0,6590	BERKEMBANG
7	7324012011	BALAI KEMBANG	MANGKUTANA	0,7640	MAJU
8	7324012013	PANCA KARSA	MANGKUTANA	0,7619	MAJU
9	7324012014	SINDU AGUNG	MANGKUTANA	0,7287	MAJU
10	7324012015	WONOREJO TIMUR	MANGKUTANA	0,8840	MANDIRI
11	7324012016	KORONCIA	MANGKUTANA	0,8124	MAJU
12	7324022001	NUHA	NUHA	0,6305	BERKEMBANG
13	7324022003	NIKKEL	NUHA	0,8457	MANDIRI

14	7324022005	MATANO	NUHA	0,6603	BERKEMBANG
15	7324022009	SOROWAKO	NUHA	0,8400	MANDIRI
16	7324032001	LOEHA	TOWUTI	0,7400	MAJU
17	7324032002	MAHALONA	TOWUTI	0,7059	BERKEMBANG
18	7324032003	TIMAMPU	TOWUTI	0,8730	MANDIRI
19	7324032004	WAWONDULA	TOWUTI	0,9589	MANDIRI
20	7324032005	LANGKEA RAYA	TOWUTI	0,8681	MANDIRI
21	7324032006	TOKALIMBO	TOWUTI	0,6959	BERKEMBANG
22	7324032007	BARUGA	TOWUTI	0,9163	MANDIRI
23	7324032008	PEKALOA	TOWUTI	0,7678	MAJU
24	7324032009	LIOKA	TOWUTI	0,7973	MAJU
25	7324032010	ASULI	TOWUTI	0,9332	MANDIRI
26	7324032011	BANTILANG	TOWUTI	0,7130	MAJU
27	7324032012	MASIKU	TOWUTI	0,6570	BERKEMBANG
28	7324032013	RANTE ANGIN	TOWUTI	0,7519	MAJU
29	7324032014	MATOMPI	TOWUTI	0,7210	MAJU
30	7324032015	TOLE	TOWUTI	0,6610	BERKEMBANG
31	7324032016	LIBUKAN MANDIRI	TOWUTI	0,7443	MAJU
32	7324032017	KALOSI	TOWUTI	0,7137	MAJU
33	7324032018	BUANGIN	TOWUTI	0,6889	BERKEMBANG
34	7324042001	HARAPAN	MALILI	0,7454	MAJU
35	7324042002	LASKAP	MALILI	0,8511	MANDIRI
36	7324042004	MANURUNG	MALILI	0,8359	MANDIRI
37	7324042005	WEWANGRIU	MALILI	0,7911	MAJU
38	7324042006	BARUGA	MALILI	0,8673	MANDIRI
39	7324042007	LAKAWALI	MALILI	0,8994	MANDIRI
40	7324042008	USSU	MALILI	0,7603	MAJU
41	7324042009	TARABBI	MALILI	0,7078	MAJU
42	7324042010	BALANTANG	MALILI	0,8378	MANDIRI
43	7324042011	ATUE	MALILI	0,7632	MAJU
44	7324042012	PONGKERU	MALILI	0,7522	MAJU
45	7324042013	PUNCAK INDAH	MALILI	0,9400	MANDIRI
46	7324042014	PASI-PASI	MALILI	0,7759	MAJU
47	7324042015	LAKAWALI PANTAI	MALILI	0,8371	MANDIRI
48	7324052001	TAWAKUA	ANGKONA	0,7614	MAJU
49	7324052002	TAMPINNA	ANGKONA	0,7544	MAJU
50	7324052003	SOLO	ANGKONA	0,8159	MANDIRI
51	7324052004	TARIPA	ANGKONA	0,7613	MAJU

52	7324052005	MANTADULU	ANGKONA	0,7154	MAJU
53	7324052006	BALIREJO	ANGKONA	0,8321	MANDIRI
54	7324052007	MALIWOWO	ANGKONA	0,7110	MAJU
55	7324052008	LAMAETO	ANGKONA	0,8206	MANDIRI
56	7324052009	WATANGPANUA	ANGKONA	0,8710	MANDIRI
57	7324052010	WANASARI	ANGKONA	0,8375	MANDIRI
58	7324062001	LAMPENAI	WOTU	0,7081	MAJU
59	7324062002	TARENGGE	WOTU	0,8960	MANDIRI
60	7324062003	MARAMBA	WOTU	0,7038	BERKEMBANG
61	7324062004	CENDANA HIJAU	WOTU	0,7562	MAJU
62	7324062005	BAWALIPU	WOTU	0,8770	MANDIRI
63	7324062006	KALAENA	WOTU	0,6248	BERKEMBANG
64	7324062007	LERA	WOTU	0,7710	MAJU
65	7324062008	KANAWATU	WOTU	0,7059	BERKEMBANG
66	7324062009	BAHARI	WOTU	0,7130	MAJU
67	7324062010	KARAMBUA	WOTU	0,6970	BERKEMBANG
68	7324062011	PEPURO BARAT	WOTU	0,7062	BERKEMBANG
69	7324062012	BALO-BALO	WOTU	0,6886	BERKEMBANG
70	7324062013	RINJANI	WOTU	0,6600	BERKEMBANG
71	7324062014	TARENGGE TIMUR	WOTU	0,6070	BERKEMBANG
72	7324062015	MADANI	WOTU	0,7205	MAJU
73	7324062016	TABAROGÉ	WOTU	0,6697	BERKEMBANG
74	7324062017	AROLIPU	WOTU	0,7851	MAJU
75	7324072001	BURAU	BURAU	0,8546	MANDIRI
76	7324072002	JALAJJA	BURAU	0,8805	MANDIRI
77	7324072003	LEWONU	BURAU	0,7019	BERKEMBANG
78	7324072004	LAMBARESE	BURAU	0,7092	MAJU
79	7324072005	LAUWO	BURAU	0,6998	BERKEMBANG
80	7324072006	BONE PUTE	BURAU	0,7489	MAJU
81	7324072007	LUMBEWE	BURAU	0,7503	MAJU
82	7324072008	MABONTA	BURAU	0,6965	BERKEMBANG
83	7324072009	LARO	BURAU	0,7054	BERKEMBANG
84	7324072010	BENTENG	BURAU	0,7816	MAJU
85	7324072011	BATU PUTIH	BURAU	0,6067	BERKEMBANG
86	7324072012	LANOSI	BURAU	0,6537	BERKEMBANG
87	7324072013	LAGEGO	BURAU	0,7724	MAJU
88	7324072014	CENDANA	BURAU	0,6795	BERKEMBANG
89	7324072015	BURAU PANTAI	BURAU	0,6260	BERKEMBANG

90	7324072016	ASANA	BURAU	0,6314	BERKEMBANG
91	7324072017	KALATIRI	BURAU	0,6667	BERKEMBANG
92	7324072018	LAMBARA HARAPAN	BURAU	0,7019	BERKEMBANG
93	7324082001	BAYONDO	TOMONI	0,8437	MANDIRI
94	7324082002	MULYASRI	TOMONI	0,8246	MANDIRI
95	7324082007	LESTARI	TOMONI	0,7484	MAJU
96	7324082008	KALPATARU	TOMONI	0,7595	MAJU
97	7324082011	TADULAKO	TOMONI	0,7554	MAJU
98	7324082012	BERINGIN JAYA	TOMONI	0,8200	MANDIRI
99	7324082015	BANGUN JAYA	TOMONI	0,8489	MANDIRI
100	7324082016	MANDIRI	TOMONI	0,9106	MANDIRI
101	7324082017	SUMBER ALAM	TOMONI	0,7337	MAJU
102	7324082018	UJUNG BARU	TOMONI	0,7398	MAJU
103	7324082019	BANGUN KARYA	TOMONI	0,7184	MAJU
104	7324082020	RANTE MARIO	TOMONI	0,7700	MAJU
105	7324092001	KERTORAHARJO	TOMONI TIMUR	0,8678	MANDIRI
106	7324092002	CENDANA HITAM	TOMONI TIMUR	0,8211	MANDIRI
107	7324092003	PURWOSARI	TOMONI TIMUR	0,7357	MAJU
108	7324092004	PATTENGKO	TOMONI TIMUR	0,7938	MAJU
109	7324092005	MANUNGGAL	TOMONI TIMUR	0,7687	MAJU
110	7324092006	MARGOMULYO	TOMONI TIMUR	0,7640	MAJU
111	7324092007	ALAM BUANA	TOMONI TIMUR	0,7873	MAJU
112	7324092008	CENDANA HITAM TIMUR	TOMONI TIMUR	0,7225	MAJU
113	7324102001	KALAENA KIRI	KALAENA	0,9533	MANDIRI
114	7324102002	SUMBER AGUNG	KALAENA	0,9367	MANDIRI
115	7324102003	PERTASI KENCANA	KALAENA	0,7802	MAJU
116	7324102004	NON BLOK	KALAENA	0,7767	MAJU
117	7324102005	ARGOMULYO	KALAENA	0,7138	MAJU
118	7324102006	SUMBER MAKMUR	KALAENA	0,8567	MANDIRI
119	7324102007	MEKAR SARI	KALAENA	0,8079	MAJU
120	7324112001	LEDU LEDU	WASUPONDA	0,7602	MAJU
121	7324112002	KAWATA	WASUPONDA	0,7625	MAJU
122	7324112003	TABARANO	WASUPONDA	0,8362	MANDIRI
123	7324112004	WASUPONDA	WASUPONDA	0,8173	MANDIRI
124	7324112005	PARUMPANAI	WASUPONDA	0,7854	MAJU
125	7324112006	BALAMBANO	WASUPONDA	0,7446	MAJU
KABUPATEN LUWU TIMUR				0,7680	MAJU

(Sumber Data:Dinas PMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025)

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Di Sulawesi Selatan Tahun 2024

NO	KABUPATEN	STATUS DESA					JUMLAH DESA
		MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	
1	KEPULAUAN SELAYAR	22	17	36	6	0	81
2	BULUKUMBA	59	46	4	0	0	109
3	BANTAENG	23	23	0	0	0	46
4	JENEPONTO	34	42	6	0	0	82
5	TAKALAR	16	40	25	5	0	86
6	GOWA	76	42	3	0	0	121
7	SINJAI	42	16	9	0	0	67
8	BONE	130	136	62	0	0	328
9	MAROS	55	17	7	1	0	80
10	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	13	42	10	0	0	65
11	BARRU	33	7	0	0	0	40
12	SOPPENG	11	34	4	0	0	49
13	WAJO	24	61	57	0	0	142
14	SIDENRENG RAPPANG	33	29	5	1	0	68
15	PINRANG	36	15	11	7	0	69
16	ENREKANG	7	24	80	1	0	112
17	LUWU	30	81	54	41	1	207
18	TANA TORAJA	0	12	72	28	0	112
19	LUWU UTARA	64	65	33	4	0	166
20	LUWU TIMUR	37	60	28	0	0	125
21	TORAJA UTARA	0	4	62	44	1	111
JUMLAH		745	813	568	138	2	2266

(Sumber Data:Dinas PMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025)

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Persentase Indeks Desa Membangun Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Desa Membangun (IDM)	Maju	2021	Berkembang	0,6727
		2022	Berkembang	0,7031
		2023	Maju	0,7075
		2024	Maju	0,7680

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Desa Membangun	Maju (0,7072)	Berkembang (0,7031)	Maju (0,7075)	Maju (0,7075)	Maju (0,7816)	Maju (0,7680)	Maju	-	Maju	-

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Standar Nasional.**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
	Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	Standar Nasional
Indeks Desa Membangun	Maju (0,7816)	0,75	-

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa yang Merata dan berkelanjutan adalah :**

- Peran aktif kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa;
- Pengembangan potensi desa menjadi desa wisata yang menarik pengunjung sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat;
- Tata kelola keuangan desa yang lebih baik melalui Dana Desa yang meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan.

❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan :**

- ✓ Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, sistem administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa;
- ✓ Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga;
- ✓ Melaksanakan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- ✓ Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelayanan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Penataan Desa
 - ✓ Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.
- ✓ Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - ✓ Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- ✓ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - ✓ Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Program Pemberdayaan Sosial
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar Rp. 2.306.755.240 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.1.487.219.306 atau 64,47 dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 35,53 %. Artinya realisasi anggaran terserap cukup baik dengan capaian kinerja yang baik sehingga efisiensi penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Pemberdayaan Gender

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN GENDER* ” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Nilai	55,50	53,38**	96,18%**
Rata-Rata Capaian Kinerja			96,18%**		

Catatan : **): angka sementara

Indikator Kinerja “*Indeks Pemberdayaan Gender*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah :

$$IPG = IPM \text{ Perempuan} / IPM \text{ Laki-Laki}$$

Untuk Indikator *Indeks Pemberdayaan Gender* pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 55,50 dan realisasi capaian kinerja sebesar 53,38**(angka sementara)un karena realisasi IDG tahun 2024 belum rilis), dengan persentase capaian sebesar 96,18%, Capaian tidak diperbandingkan dengan tahun lalu karena merupakan capaian angka sementara yang diambil dari realisasi tahun 2023.

Indikator ini merupakan capaian tahun ketiga sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dan IKU Kabupaten 2022-2026,. Adapun tabel capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL CAPAIAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER
TAHUN 2020-2023**

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2019	2020	2021	2022	2023
KEPULAUAN SELAYAR	68.03	70.06	68.07	68.71	70.29
BULUKUMBA	69.89	68.22	67.1	70.32	69.74
BANTAENG	80.27	80.26	81.2	80.21	79.28
JENEPONTO	68.04	68.24	68.68	68.94	70.73
TAKALAR	70.66	68.78	70.67	73.39	74.45
GOWA	78.31	77.97	79.71	78.35	79.7
SINJAI	72.48	73.46	73.59	73.78	71.09
MAROS	69.93	72.43	72.38	71.63	71.85
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	57.03	59.44	59.94	64.12	66.38
BARRU	63.41	63.96	63.98	65.24	64.91
BONE	58.55	56.68	57.55	59.09	58.61
SOPPENG	71.45	71.15	70.54	71.07	74.6
WAJO	55.09	56.24	56.3	55.83	57.9
SIDENRENG RAPPANG	56.8	56.86	56.39	56.71	60.37
PINRANG	67.92	68.11	68.43	65.12	68.92
ENREKANG	58.28	60.32	56.51	62.98	64.68
LUWU	55.89	57.15	57.29	58.03	55.34
TANA TORAJA	69.32	68.5	68.77	70.68	70.29
LUWU UTARA	38.92	38.11	41.11	43.96	47.63
LUWU TIMUR	50.76	50.76	54.09	55.4	53.38
TORAJA UTARA	62.58	60.98	62.73	64.21	62.23
KOTA MAKASSAR	78.32	77.61	76.59	78.15	78.13
KOTA PARE-PARE	73.86	74.06	70.86	71.21	71.85
KOTA PALOPO	77.53	77.47	78.45	79.1	78.19
SULAWESI SELATAN	76.01	76.32	74.76	76.37	75.24
INDONESIA	75.24	75.57	76.26	76.59	76.9

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024)

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Cakupan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja Cakupan Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator baru tahun ketiga pada IKU Kabupaten 2022-2026 Adapun perbandingan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Cakupan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Nilai	2021	54,09	99,87%
		2022	55,4	100,44%
		2023	53,38	101,07%
		2024	53,38**	96,18**

Catatan : **): angka sementara

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (Untuk Indikator Kinerja Cakupan Indeks Pemberdayaan Gender (IDM) merupakan indikator baru tahun ketiga pada IKU Kabupaten 2022-2026.

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi								
1	Cakupan Indeks Pemberdayaan Gender- (IDG)	89,94	55,4	90,00	53,38	55,50	53,38**	-	-	-	-

Catatan : **): angka sementara

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Standar Nasional.**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
	Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	Standar Nasional
Cakupan Indeks Pemberdayaan Gender- (IDG)	53,38**	75,24**	76,9**

Catatan : **): angka sementara

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada pencapaian sasaran:**

✓ Pembentukan TIM Pokja Pengarusutamaan Gender;

- ✓ Melakukan sinergitas dengan dunia usaha dan Peran organisasi Masyarakat;
- ✓ Kabupaten Luwu Timur masih perlu didorong dalam peningkatan akses dan partisipasi perempuan di sektor politik, publik, dan ekonomi;

❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan :**

- ✓ Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur lebih optimal. Di bentuknya Tim Pokja Pengarusutamaan Gender juga berperan penting dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimulai dari Perencanaan, Penyediaan Anggaran, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Gender

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- ✓ Program Perlindungan Perempuan
 - Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

- Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- ✓ Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- ✓ Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.3.543.882.411 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.2.962.647.049 atau 83,60% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 16,40%. Artinya dengan melihat realisasi penggunaan anggaran dan realisasi kinerja dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan penggunaan anggaran yang disediakan pada indikator ini cukup efektif dan baik.

Misi Kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “**Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas**”. Untuk mencapai misi 2, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Penanaman Modal & PTSP.

Sasaran Strategis 4

Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH*” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	2,08	3,25	156,25
Rata-Rata Capaian Kinerja			156,25%		

A. Indikator Kinerja “*Cakupan Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase cakupan kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan adalah :

$$\frac{\text{Pertumbuhan PDRB sector unggulan (n)} \times 100\%}{\text{Pertumbuhan PDRB sector unggulan (n-1)}}$$

Untuk indikator kinerja *cakupan pertumbuhan PDRB Sektor unggulan* pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 2,08 % dan realisasi sebesar 3,25% dengan persentase capaian kinerja sebesar 156,25%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2024 tercapai atau adanya keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 1,19 artinya terjadi peningkatan yang sangat signifikan capaian kinerja tahun 2024. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan menurut

lapangan usaha diukur berdasarkan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Untuk lebih jelasnya laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) sektor unggulan dapat dilihat pada tabel angka A dibawah ini :

Tabe Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	-0,25	4,19	-1,65	1,19	3,25
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,66	-7,81	1,66	16,74	1,67
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	-2,71	6,58	7,50	-2,55	2,87
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4,92	6,10	5,57	5,95	9,71
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	9,34	11,76	9,24	2,50	-6,81
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	3,15	7,65	2,56	6,14	8,58
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	-1,08	6,72	7,83	4,05	4,24
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-12,94	6,73	11,67	2,93	2,73
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	-12,78	2,34	9,91	4,16	5,02
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	11,27	7,64	6,72	-3,27	1,44
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,98	5,08	2,40	4,06	9,42

(Sumber Data : BPS Luwu Timur Dalam Angka 2025)

Laju pertumbuhan produk domestik bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1 dikalikan dengan 100%. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2024, angka PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 30,40 triliun rupiah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 44,00%.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 meningkat. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Konstan 2010, mencapai 18,52

triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi percepatan ekonomi sebesar 3,27 persen.

Laju pertumbuhan PDRB 2024 atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 4,40%, nilai ini sebanding dengan laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur yang mengalami peningkatan sebesar 3,27% dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur 2020-2024



(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2025)

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian *cakupan pertumbuhan PDRB Sektor unggulan* Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Cakupan Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	2021	4,19	-
		2022	-1,65	-100,55%
		2023	1,19	60,10%
		2024	3,25	156,25%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi								
1.	Cakupan Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	1,83	-1,65	1,98	1,19	2,08	3,25	2,17	-	2,23	-

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Standar Nasional.**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
	Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	Standar Nasional
Cakupan Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	3,25	4,40	5,03

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ✓ Adanya perbaikan/Peningkatan Sarana Prasarana yang di bangun pada tahun sebelumnya dan pada tahun 2024 yang berdampak dapat meningkatkan produksi pertanian seperti pembentukan pintu air dan Jides. hal ini di karenakan kemudahan akses memperoleh air dan akses untuk menyalurkan hasil produksi pertanian;
- ✓ Adanya konsistensi serta kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta segala pihak lainnya.
- ✓ Adanya komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder untuk memfokuskan sumber-sumberdaya dan dana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam tahun 2024;
- ✓ Tumbuhnya rasa percaya diri dan kemandirian bagi kelompok tani pembudidaya ikan, kelompok nelayan, kelompok pengolahan Hasil Perikanan dan peran serta pemerintah dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan alat tangkap perikanan dan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan.

❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan:**

- ✓ Peningkatan kapasitas kompetensi petugas teknis peternakan dan edukasi peternak dalam pemeliharaan yang lebih efektif serta efisien menghasilkan produktivitas ternak;
- ✓ Stok Obat - Obat-an harus di perbanyak
- ✓ Penambahan pengadaan sapras IB (Inseminasi Buatan) untuk meningkatkan jumlah kelahiran pada ternak;
- ✓ Edukasi peternak untuk pemanfaatan pakan lokal
- ✓ Dalam menyusun anggaran kas kegiatan harus menyesuaikan dengan kesiapan pihak-pihak terkait agar pada saat pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat
- ✓ Kegiatan yang telah direncanakan harus sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun.
- ✓ Membangun kerjasama dan komunikasi yang intens antara pihak Kabupaten, Penyuluh Pertanian, Aparat Desa dan Kelompok Tani Penerima Manfaat
- ✓ Agar Penyuluhan menyediakan data kelompok tani yang update sesuai dengan kondisi di lapangan.
- ✓ Restrukturisasi pelaku Pembudidaya Ikan dan nelayan yang tidak sejalan dengan kebutuhan akan produk perikanan, dengan alternative solusi dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah kegiatan peningkatan keterampilan/kapasitas pelaku utama perikanan, pendampingan sertifikasi lahan pembudidaya nelayan, pembinaan desa pesisir dan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap;
- ✓ Melaksanakan pembinaan kelompok pemasaran hasil perikanan dan pelaksanaan kegiatan pameran dan ekspo produk perikanan
- ✓ Mendorong petani untuk menggunakan sistem pemupukan berimbang yang diintegrasikan dengan pupuk organik, dan menerapkan praktek budidaya pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan;
- ✓ Pemanfaatan Alsintan khususnya Combine Harvester (alat panen) untuk mengurangi kehilangan hasil pada saat panen;

- ✓ Harga gabah yang cukup tinggi sehingga mendorong minat petani untuk menambah areal tanam dan memberikan dampak pada peningkatan produksi dan pendapatan petani;
 - ✓ Penyediaan alokasi alat dan mesin pertanian seperti alat pemipil jagung (Corn Sheller) melalui alokasi bantuan APBN dan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - ✓ Penyediaan saprodi (pupuk) melalui alokasi pupuk bersubsidi;
 - ✓ Memfasilitasi alokasi bantuan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) sesuai sepsifik lokasi melalui alokasi bantuan APBN dan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - ✓ Melakukan pendampingan intensif kepada para petani untuk terus menerapkan praktek budidaya yang baik;
 - ✓ Mendorong kegiatan intensifikasi melalui bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk baik yang bersumber dari APBN, APBD I maupun APBD II, serta selalu memberikan penyuluhan kepada petani untuk memanfaatkan pupuk alternatif dari hasil pengolahan dan pemanfaatan pupuk organik;
 - ✓ Untuk penanganan jangka menengah/Panjang, dilakukan upaya peremajaan tanaman terhadap tanaman-tanaman yang sudah tua/rusak.
- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
- ✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - ✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - ✓ Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - ✓ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - ✓ Program Penyuluhan Pertanian;
 - ✓ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
 - ✓ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - ✓ Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 - ✓ Program Pengawasan Keamanan Pangan;
 - ✓ Program Pengelolaan Budidaya Perikanan
 - ✓ Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar Rp.108.749.837.414,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.94.761.608.790,57 atau 87,14% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 12,86%. Dengan melihat realisasi anggaran dan realisasi kinerja dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada indikator ini cukup efektif dan tepat sasaran berdasarkan hasil capaian yang diperoleh.

Sasaran Strategis 5

Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *KETERSEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN DAN LAPANGAN USAHA* dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,80	4,58	61%
Rata-Rata Capaian Kinerja			61%		

Indikator Kinerja “*Tingkat Pengangguran Terbuka*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase Tingkat Pengangguran Terbuka adalah:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{7.443}{162.431} \times 100 \%$$

$$= 0,045 \times 100$$

$$= 4,58$$

Untuk Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Luwu Timur, target kinerja tahunan untuk tahun 2024 adalah 2,80%, adapun realisas kinerja adalah 4,58% dengan persentase capaian kinerja sebesar 61%, hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak tercapai atau angka pengangguran terbuka masih cukup besar dan belum sepenuhnya terserap oleh pangsa pasar kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana target kinerja

sebesar 3,05% dengan realisas kinerja sebesar 5,42% dengan persentase capaian sebesar 56%, terjadi pergerakan atau pergeseran target yang cenderung meningkat dan secara keseluruhan capaian realisasi target dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan atau **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan 0,84 persen poin dari Tahun 2023 ke Tahun 2024.**

Jumlah angkatan kerja berdasarkan survei angkatan kerja nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 162.431 orang, naik 5.131 orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,93 persen poin dibanding Agustus 2023. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 154.988 orang, naik sebanyak 6.209 orang dari Agustus 2023. Pada Agustus 2024 sebanyak 57.959 orang (37,40 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 0,12 persen poin dibanding Agustus 2023.

Jika dibandingkan dengan rata-rata TPAK Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 67,38 persen, TPAK Luwu Timur lebih besar yaitu mencapai 70,18 persen. Hal ini berarti tingkat partisipasi penduduk Luwu Timur dalam perekonomian daerah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penduduk Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, tingkat pengangguran Luwu Timur mengalami penurunan menjadi 4,58 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran rata-rata Sulawesi Selatan yang sekitar 4,19 persen. Pada Tahun 2024, persentase pekerja di sektor pertanian Luwu Timur mencapai sekitar 42,13 persen lebih tinggi dari rata-rata persentase pekerja pertanian di Sulawesi Selatan (35,40 persen).

**Tabel Perbandingan Indikator Luwu Timur dengan Sulawesi Selatan (persen)
Agustus 2024**

Indikator	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
1	2	3
TPAK	70,18	67,38
TPT	4,58	4,19
Pekerja Sektor Pertanian	42,13	35,40

Angkatan kerja adalah (Labor Force) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang melakukan kegiatan bekerja secara aktif atau sedang mencari pekerjaan yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran berarti menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Adapun perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu Timur dengan seluruh Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Data Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

URAIAN KETENAGAKERJAAN	JUMLAH
Penduduk Usia Kerja	231.443 orang
Angkatan Kerja	162.431 orang
▪ Bekerja	154.988 orang
▪ Tidak Bekerja	7.443 orang
Bukan Angkatan Kerja	69.012 orang
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,58 %
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,18%

(sumber Data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2025)

Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus), 2022-2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)		
	2022	2023	2024
Kepulauan Selayar	1,49	1,98	2,05
Bulukumba	1,26	1,31	2,23
Bantaeng	2,72	3,71	2,57
Jeneponto	2,21	2,13	2,47
Takalar	2,63	3,58	3,84
Gowa	3,26	3,43	3,91
Sinjai	1,8	1,69	1,52
Maros	5,04	3,64	4,34
Pangkep	5,23	5,05	3,99
Barro	5,32	5,89	6,42
Bone	2,27	2,88	2,28
Soppeng	3,4	4,34	3,33
Wajo	2,54	2,1	2,31
Sidrap	3,56	3,29	3,02
Pinrang	2,79	3,64	3,12
Enrekang	0,58	1,53	1,51
Luwu	3,85	3,7	4,14
Tana Toraja	2,32	3,37	3,98
Luwu Utara	2,81	2,63	2,39
Luwu Timur	4,48	5,42	4,58
Toraja Utara	1,99	2,6	2,44
Makassar	11,82	10,6	9,71
Pare Pare	5,6	5,86	5,23
Palopo	8,2	7,81	7,64
SULAWESI SELATAN	4,51	4,33	4,19

Sumber Data : (BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2025)

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2021	4,96	42%
		2022	4,48	74%
		2023	5,42	56%
		2024	4,58	61%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi								
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,30	4,48	3,05	5,42	2,80	4,58	2,55	-	2,30	-

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Standar Nasional.**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
	Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	Standar Nasional
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,58	4,19	4,91

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan pencapaian sasaran indikator kinerja:**

- ✓ Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja tahun 2024;
- ✓ Penurunan jumlah pencari kerja tahun 2024 berdasarkan data pencari kerja pada aplikasi siap kerja.

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target kinerja berdasarkan realisasi:**

- ✓ Jumlah Penduduk Usia Kerja serta Angkatan Kerja yang relatif meningkat setiap tahunnya dan tidak sebanding dengan peningkatan Jumlah lowongan kerja yang tersedia;
- ✓ Kurang aktifnya lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta serta Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang masih terbatas yang ada di Kabupaten Luwu Timur;
- ✓ Masih banyak Perusahaan yang belum mempunyai sarana hubungan industrial seperti Peraturan Perusahaan (PP) walaupun sudah dilakukan pembinaan untuk menyusun Peraturan Perusahaan dimana Perusahaan masih menganggap hal tersebut bukan hal yang penting;
- ✓ Adanya efisiensi anggaran pada Tahun 2024 sehingga ada beberapa capaian kegiatan dan daya serap anggaran belum maksimal seperti Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi SIO alat berat sebanyak 93 orang tidak dapat dilaksanakan. Hal ini pula yang mempengaruhi capai Program Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja tidak tercapai atau hanya 62,61 %.

❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan untuk pencapaian kinerja :**

- ✓ salah satu strategi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja/pencari kerja yang berbasis kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan agar para pencari kerja dan tenaga kerja dapat bersaing dalam dunia kerja serta mengoptimalkan penyebarluasan

informasi bursa kerja. diharapkan pula agar Perusahaan yang melakukan penerimaan dan penempatan tenaga kerja agar terus melaporkan dan melakukan koordinasi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. selain itu, meningkatnya investasi juga dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga perlu adanya kebijakan yang diambil untuk meningkatkan investasi di kabupaten Luwu Timur;

- ✓ Pembinaan syarat-syarat kerja kepada pengurus perusahaan dan pekerja/buruh yang berdampak terhadap meningkatnya kompetensi dan kepatuhan pengurus perusahaan dan pekerja/buruh terhadap regulasi ketenagakerjaan khususnya terkait dengan perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja;
 - ✓ Pendataan dan pengurusan kartu pencari kerja sudah berbasis aplikasi (online) sehingga mempermudah pelayanan bagi masyarakat dalam mengurus kartu pencari kerja.
- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
- ✓ Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Outputnya adalah jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.
 - ✓ Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Output sub kegiatan ini yaitu Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun-n dengan realisasi 120 orang dari target 213 orang atau dengan Tingkat capaian 56,33%. Tingkat capaian masih rendah karena adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan 2024 sehingga Pelatihan/ sertifikasi SIO alat berat dan Dump truck sebanyak 93 orang tidak dapat dilaksanakan.
 - Ada 2 (dua) jenis pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerjasama ATS sebanyak 60 Orang (welder, otomotif dan computer) dan Pelatihan dasar operator alat berat (excavator) sebanyak 60 orang bekerjasama dengan LPKS Mandiri.
 - ✓ Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya adalah jumlah penempatan tenaga kerja.

- a. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja.
Sub Kegiatan ini berupa bimbingan dan penyuluhan bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dengan output Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan. Target kegiatan 80 orang dengan realisasi 80 orang atau dengan tingkat capaian 100%.
 - b. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.
Output kegiatan Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja. Kegiatan ini berupa pelatihan dan bimbingan bagi calon tenaga nasionkerja mandiri atau yang mempunyai usaha sendiri untuk pengembangan usahanya baik itu dari segi Manajemen Usaha maupun SDM. Realisasi 60 orang dari target 60 orang (100%).
- Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- a. Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, Output dari Subkegiatan ini yaitu Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub). Realisasi 4.923 dari target 4.500 orang yang terdaftar sebagai pencari kerja pada aplikasi Siap Kerja atau dengan Tingkat capaian 109,4%.
- Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
- a. Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI), Output dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi asal Kab. Luwu Timur dan Ditingkatkan Kompetensinya. Selama tahun 2024 hanya ada 1 Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Luwu Timur yang bermasalah yang dilaporkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dari target 4 orang. Anggaran dari subkegiatan ini bersifat disiapkan. Namun demikian, tetap dilakukan Koordinasi dengan Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
- ✓ Program Hubungan Industrial
- Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan. Output subkegiatan ini Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan dengan realisasai 36 Perusahaan (Laporan) dari target 36 Perusahaan atau dengan Tingkat capaian 100%.
 - b. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan, Ouput dari subkegiatan ini yaitu Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online, realisasi 15 Perusahaan dari target 15 Perusahaan (100%).
- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- a. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota/Kota, Output dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Perselisihan yang Dicegah, realisasi 2 kasus dari target 2 kasus (100%);
 - b. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka/Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi dan dimediasi, target 38 Kasus sedangkan realisasi sebanyak 38 kasus atau dengan tingkat capaian 100%;
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi,
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, Output sub kegiatan ini yaitu umlah LKS Tripartit yang Dibina, realisasi 1 Lembaga Tripartit dari target 1 Lembaga Tripartit (100%);
 - e. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, Output Sub kegiatan ini yaitu Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Realisasi 12.885 orang tenaga kerja terdaftar yang menjadi peserta jamsostek (100%).

- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar Rp.2.626.446.850 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.1.814.672.847 atau 69,09 % dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 30,91%. Artinya realisasi penggunaan anggaran yang cukup efisien, dengan keberhasilan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,84 persen walaupun tidak diikuti dengan keberhasilan pencapaian target tahunan.

Misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “**Menyediakan Infrastruktur Daerah Yang Memadai dan Lingkungan Yang Berkualitas**” dengan tujuan “**Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah Secara Berkelanjutan**”. Untuk mencapai misi 3, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*MENINGKATNYA DAYA GUNA DAN HASIL GUNA INFRASTRUKTUR DAERAH*” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	84,40	88,34	104,67
Rata-Rata Capaian Kinerja			104,67%		

Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/II/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh realisasi persentase Cakupan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur :

Nilai IKM terhadap layanan infrastruktur dihitung dengan menggunakan nilai “rata-rata Tertimbang” terhadap jumlah unsur yang dinilai, Dalam Perhitungan indeks Kepuasan layanan Infrastruktur terhadap sejumlah X unsur yang dikaji, maka setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X}$$

Dimana X adalah jumlah unsur yang dikaji

$$\text{IKLI} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

IKM Unit Layanan x 25

Variabel unsur yang dinilai dalam IKLI antara lain meliputi : Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas,,Penyediaan Transportasi (Darat,ASDP,Laiut dan Udara), Penyediaan Infrastruktur Air Bersih; Penyediaan;Penyediaan Irigasi (pertanian dan air baku);penyediaan infrastruktur perumahan.

((Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (823,19) / panjang seluruh jalan kabupaten (2.229,869) x 90% + Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik (403) / jumlah total jembatan kabupaten (443) x 10%) + (Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (3.414,97) / luas irigasi kabupaten (6.788) x 40% + Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik (98,00) / Panjang seluruh saluran irigasi kabupaten (142,48) x 35% + Panjang sungai kabupaten dalam kondisi baik(0) / panjang total sungai (0) x 20% + Panjang pantai kabupaten dalam kondisi baik (0) / panjang total pantai (0) x 5%) + (Jumlah Penduduk berakses air minum (191.370) / jumlah penduduk (316.000) x 40% + Jumlah rumah tinggal bersanitasi (95.619) / jumlah rumah tinggal (96.448) x 15% + Jumlah bangunan dalam kondisi baik (41) / jumlah bangunan(45) x 45%) + (Luas areal permukiman tertata (960,82) / luas areal permukiman keseluruhan(964,11) x 35% + Luas permukiman kumuh yang ditangani (43,10) / luas permukiman kumuh yang seharusnya ditangani(95) x 35% + Jumlah rumah layak huni (61.016) / jumlah total rumah(67.924) x 30%) + (Jumlah perlengkapan jalan yang ada (162.088) / jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada(458.310) x 100% + Jumlah prasarana perhubungan yang ada (10,7332) / jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada(13) x 100%) / 2 + (Jumlah cakupan koneksi internet pada desa dan kelurahan (128) / jumlah desa dan kelurahan(128) x 100%) + Jumlah cakupan koneksi internet pada ruang publik (20) / jumlah ruang publik (20) x 100% + Jumlah cakupan koneksi internet pada OPD (41) / Jumlah OPD (41) x 100%) / 3))/6

$$= (823,19 / 2.229,869 \times 90\%) + (403 / 443 \times 10\%) + (3.414,97 / 6.788 \times 40\%) + (98,00 / 142,48 \times 35\%) + (0 / 0 \times 20\%) + (0 / 0 \times 5\%) + (191,370 / 316.000 \times 40\%) + (95.619 / 96.448 \times 15\%) + (41 / 45 \times 45\%) + (960,82 / 964,1 \times 35\%) + (43,10 / 95 \times 35\%) + (61.016 / 67.924 \times 30\%) + (162.008 / 458.310 \times 100\%) + (10,7332 / 13 \times 100\% / 2) + (128 / 128 \times 100\%) + (20 / 20 \times 100\%) + (41 / 41 \times 100\% / 3) / 6$$

$$= (33,22) + (9,09) + (20,12) + (24,07) + (0) + (0) + (0,024) + (14,87) + (41) + (34,88) + (15,87) + (26,94) + (35,34) + (41,27) + (100) + (100) + (33,33) / 6$$

$$= 530,024 / 6$$

$$= \mathbf{88,34}$$

Untuk Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 84,40% dan realisasi kinerja sebesar 88,34% dengan persentase capaian kinerja 104,67%, hal menunjukkan bahwa target dapat dicapai atau keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana *indeks pembangunan infrastruktur* yang ditargetkan sebesar 74,93 dan realisasi kinerja 84,27 artinya terjadi peningkatan capaian kinerja tahunan.

Luas Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



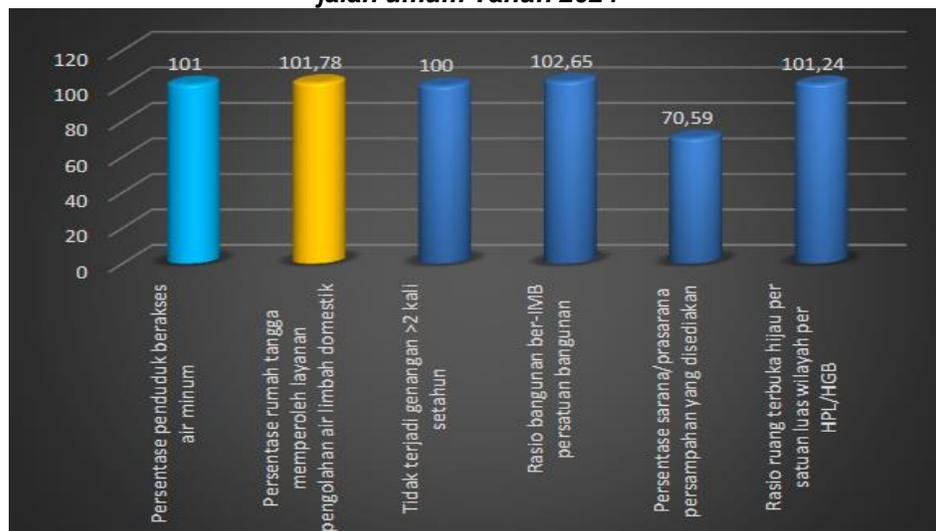
(Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Tahun 2024)

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2024



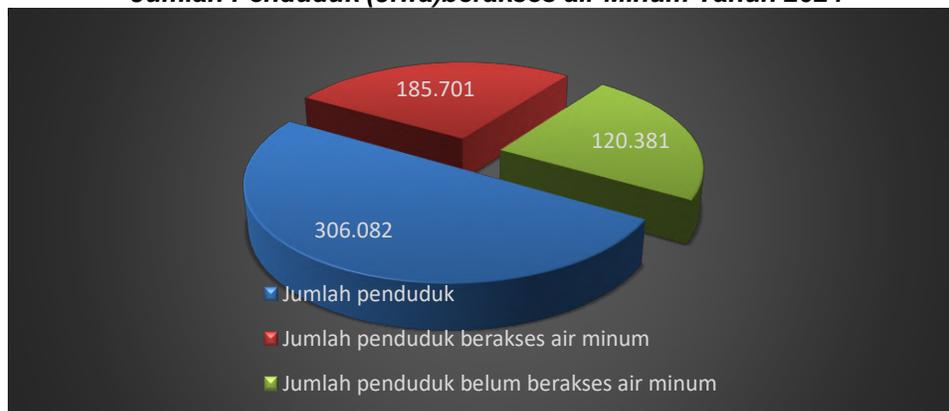
(Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Tahun 2024)

Cakupan indikator sasaran Meningkatkan layanan keciptakarya: air minum, sanitasi, drainase, IMB dan bangunan/lingkungan, persampahan dan penerangan jalan umum Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Tahun 2024

Jumlah Penduduk (Jiwa)berakses air Minum Tahun 2024



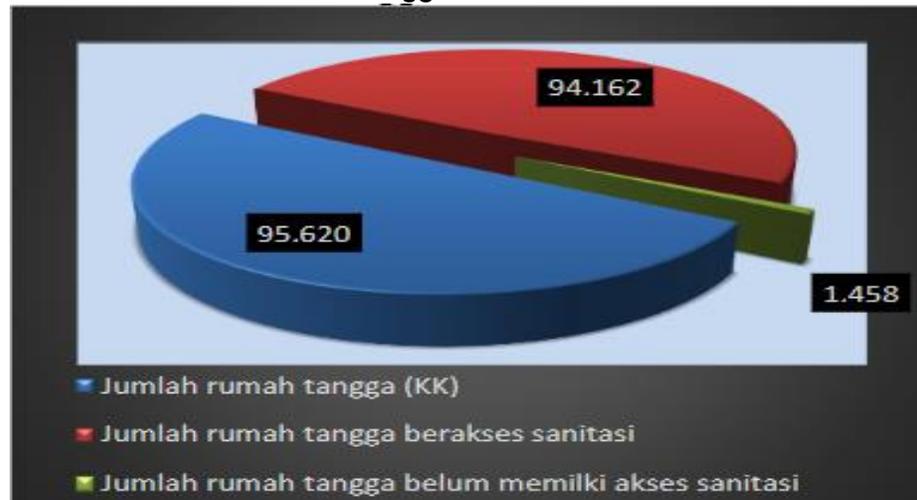
Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2024

Jumlah Penduduk (Jiwa) berakses air Minum Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Tahun 2024

Jumlah rumah tinggal bersanitasi Tahun 2024



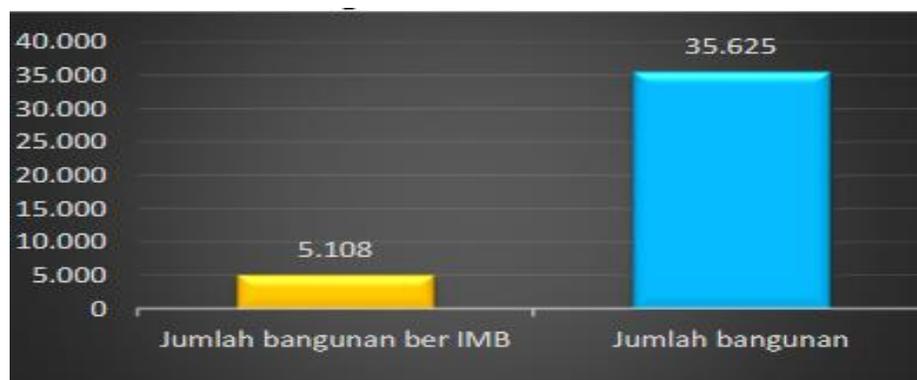
Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2024

Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2024

Jumlah bangunan ber IMB Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2024

Persentase jalan kondisi mantap (baik dan sedang) Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data DD1 Bidang Bina Marga Tahun 2024

Panjang peningkatan Jalan (Km) Tahun 2019 - 2023

Tahun	Aspal	Beton	Kerikil
Tahun 2019	39,717	3,653	11,565
Tahun 2020	28,029	3,4631	27,391
Tahun 2021	8,56	5,16	72,69
Tahun 2022	8,94	5,78	32,07
Tahun 2023	9,00	1,00	24,08

Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

Jumlah Jembatan menurut kondisinya Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan (Unit) Tahun 2019 - 2023

Tahun	Pembangunan jembatan	Pemeliharaan jembatan
Tahun 2019	8 unit	3 unit
Tahun 2020	4 unit	3 unit
Tahun 2021	7 unit	3 unit
Tahun 2022	8 unit	4 unit
Tahun 2023	16 unit	4 unit

Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Jasa Konstruksi Tahun 2024

Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Penataan Ruang Tahun 2024

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Nilai Cakupan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinera	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	2022	58,21	77,73%
		2023	84,27	112,46
		2024	88,34	104,67

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi								
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	74,89	58,21	74,93	84,27	84,40	88,34	85	-	75,59	-

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Standar Nasional.**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
	Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	Standar Nasional
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	88,34	-	-

❖ **Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ✓ Pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge;
- ✓ Penyediaan perlengkapan jalan dengan pemasangan Penerangan Jalan Umum sebanyak 146 unit yang tersebar di kelurahan Magani, Kec. mangkutana, Kelurahan Tomoni, Kec. Towuti, Desa Ledu-Ledu , Desa Bawalipu, Pantai Suso dan 130 unit lampu hias yang dipasanga di Kec. Malili yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, selain itu rambu lalu lintas sebagai peringatan dan tanda bagi para pengguna jalan baik pejalan kaki , kendaraan roda dua, ataupun kendaraan roda empat dan titik penempatan rambu sesuai dengan harmonisasi yang diatur;
- ✓ Pemanfaatan dan pemeliharaan bus sekolah sebanyak 28 Unit, untuk keamanan dan kenyamanan penumpang yaitu siswa siswi SMA dan SMP se-Kabupaten Luwu Timur dan pengadaan 2 unit Bus untuk memenuhi kebutuhan siswa siswi yang ada di kabupaten Luwu timur, selain itu dilaksanakan angkutan mudik dan balik gratis kepada 420 orang saat Hari Raya Idhul Fitri;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana LLAJ berupa pemeliharaan perlengkapan jalan, pemeliharaan halte bus sekolah serta pemeliharaan 3 unit terminal yang ada di Dinas Perhubungan dilaksanakan secara rutin, untuk menjamin kamanan dan kenyamanan pengguna sarana dan prasarana LLAJ;
- ✓ Adanya anggaran yang masuk bersumber dari dana DAK;
- ✓ Adanya anggaran yang masuk bersumber dari dana DAU EARMARKED;
- ✓ Telah tersusunnya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK);
- ✓ Diterapkannya program TAMANKU ASRI yang merupakan sebuah gerakan perubahan dari sistem kerja yang belum mampu menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh secara maksimal, menjadi sebuah sistem kerja kolaboratif yang dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam melaksanakan penanganan permukiman kumuh secara efektif;
- ✓ Pembangunan infrastruktur koneksi internet di wilayah area publik.

❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan :**

- ✓ Semua ruas jalan akan dilengkapi PJU sesuai target kinerja;
- ✓ Mempercepat proses Pelaksanaan Barang dan Jasa;

- ✓ Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait agar seluruh permohonan pengurusan pas kecil dapat ditindaklanjuti.
 - ✓ Meningkatkan kesadaran dari semua pihak dalam menangani permasalahan yang ada khususnya dalam kegiatan penanganan kawasan kumuh;
 - ✓ Meningkatkan koordinasi dan membentuk tim koordinasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi;
 - ✓ Melakukan inovasi dalam efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat yang dicapai;
 - ✓ Meningkatkan kompetensi SDM berbasis teknologi digital.
- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
- ✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat;
 - Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja.
 - ✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan;
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.
 - ✓ Program Penyelenggaraan Jalan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jalan;
 - Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar;

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan;
 - Sub Kegiatan Pelebaran Jembatan;
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan.
- ✓ Program Pengembangan Perumahan
- Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota;
 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah susun dan Rumah Khusus
 - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
 - Pembangunan rumah bagi korban bencana;
 - Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten Kota.
- ✓ Program Kawasan Permukiman
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah sepuluh Ha
 - Perbaikan Rumah tidak layak huni;
 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Peremajaan Permukiman Kumuh.
- ✓ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian.
- ✓ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
 - Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- Pembangunan Gedung Terminal;
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota;
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.
- ✓ Program Pengelolaan Pelayaran
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;

- Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau.
- ✓ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
 - Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar Rp.159.314.900.761 dan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.130.368.377.623,04 atau 81,83% dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 18,17%. Artinya daya serap anggaran yang cukup baik dengan realisasi kinerja yang mencapai target, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 7

Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA ” dengan 2(dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Kualitas lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	88,35	77,93	88,21 %
2.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	152 (tinggi)	133,38	114%
Rata-Rata Capaian Kinerja			101,105%		

A. Indikator Kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase indeks kualitas lingkungan hidup daerah adalah :

Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU dan IKL) telah dihitung dan diketahui nilainya. Komponen indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH berdasarkan level wilayah yaitu :

- IKLH Nasional meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL
- IKLH Provinsi meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL; dan
- IKLH Kabupaten/Kota meliputi IKA, IKU dan IKL.

Selanjutnya setelah semua komponen indeks telah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH. IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan (Nilai dan Raport IKLH Kabupaten/Kota) sebagai berikut :

$$\text{IKLH Kab/Kota} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

KATEGORI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 3.6 Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

NO	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber : Permen KLHK Nomor 27 Tahun 2021

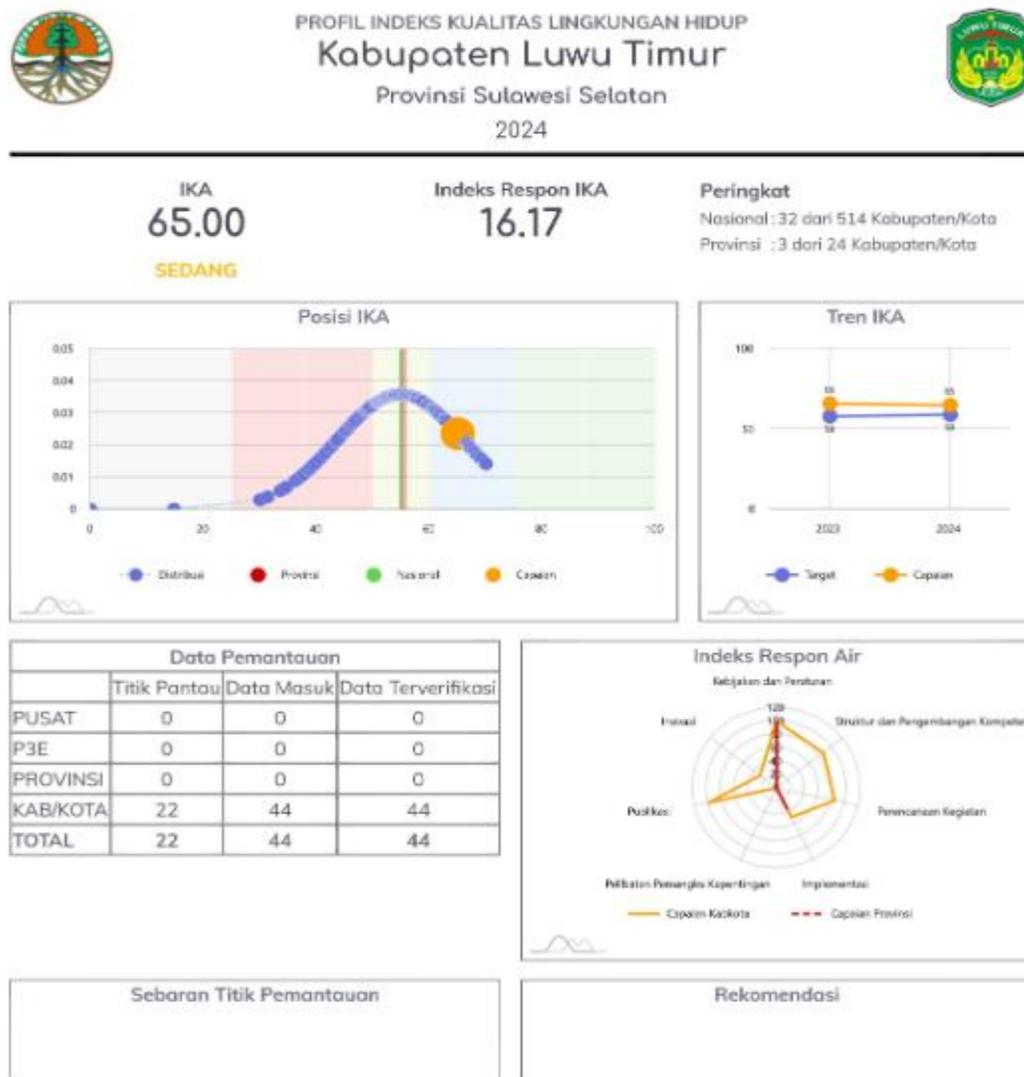
$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= (0,376 \times 65,00) + (0,405 \times 91,85) + (0,219 \times 74,40) \\ &= (24,44) + (37,20) + (16,29) \\ &= 77,93 \end{aligned}$$



Untuk Indikator kinerja tahunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Luwu Timur, target kinerja tahun 2024 sebesar 88,35 dan realisasi capaian target kinerja adalah sebesar 77,93% dengan persentase capaian kinerja sebesar 88,21%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana target kinerja tahunan sebesar 88,10% dengan realisasi

capaian kinerja sebesar 80,09%, artinya ada penurunan capaian realisasi kinerja IKLH Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 2,16%. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, dan adapun capaian indikator IKLH Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

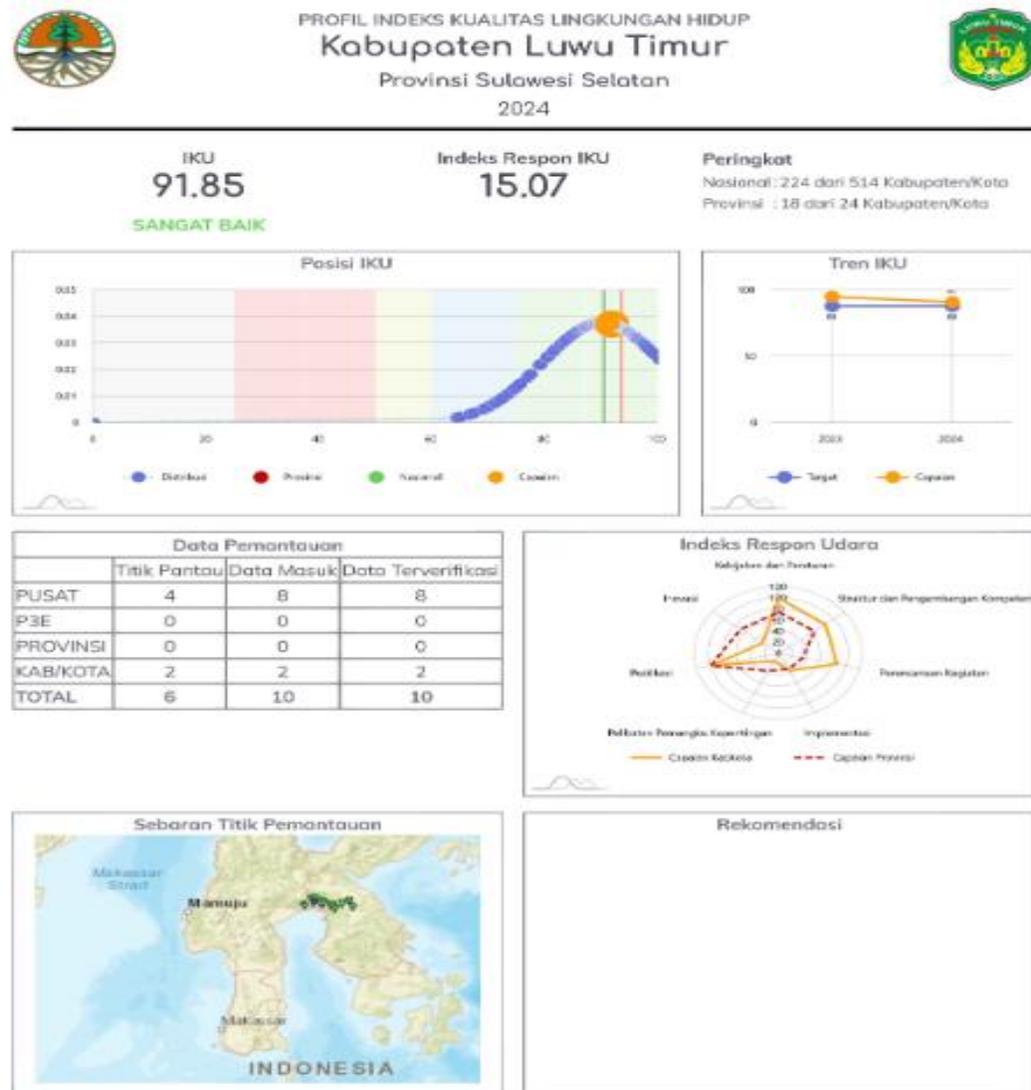
Gambar 1.1. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



(Sumber Data : <https://ppkl.menlhk.go.id/klh/>, 2025)

Apabila dibandingkan dengan nilai IKA tahun 2023 sebesar 66,25 maka nilai IKA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,25 poin. Nilai IKA memang mengalami penurunan tetapi kategori indeks masih sama dengan tahun 2023 yaitu kategori **Sedang**.

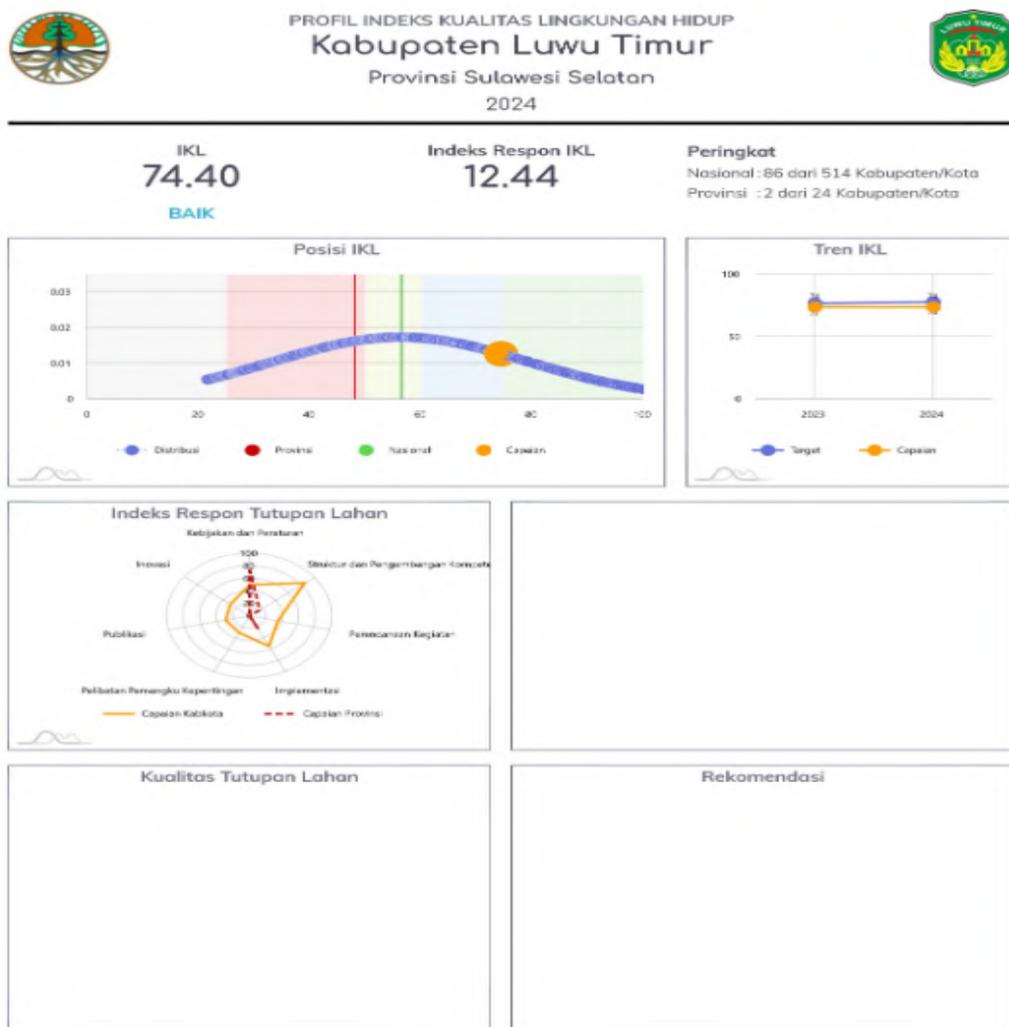
Gambar 1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



(Sumber Data : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2025)

Apabila dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2023 sebesar 95,97 maka nilai IKU Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,12 poin. Nilai IKU memang mengalami penurunan tetapi kategori indeks masih sama dengan tahun 2023 yaitu kategori **sangat baik**.

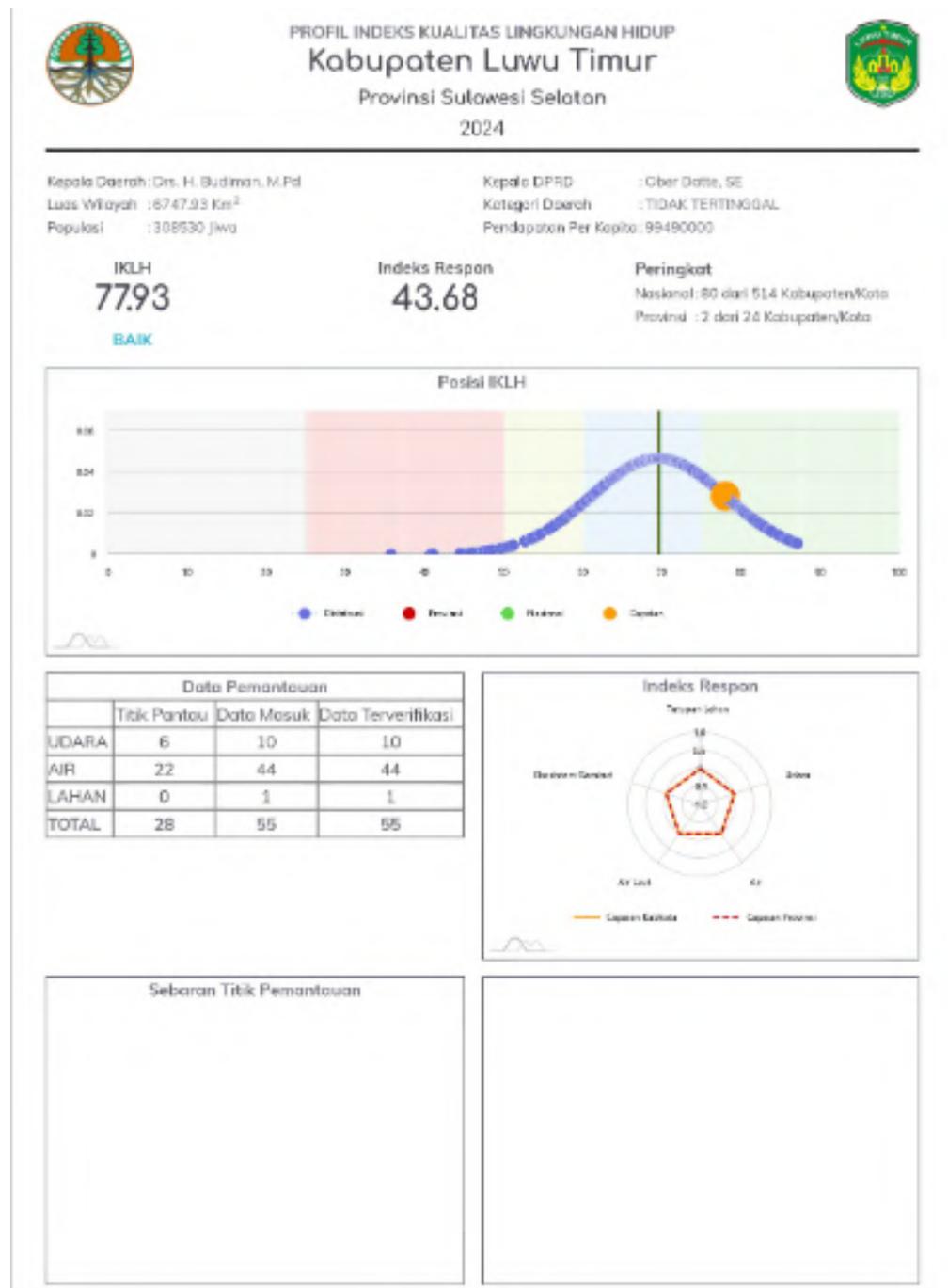
Gambar 1.3. Indeks Kualitas Udara (IKL) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



(Sumber Data : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>,2025)

Apabila dibandingkan dengan nilai IKL tahun 2023 sebesar 74,46 maka nilai IKL Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,06 poin. Nilai IKL memang mengalami penurunan tetapi kategori indeks masih sama dengan tahun 2023 yaitu kategori **Baik**.

Gambar 1.4. Indeks Kualitas Udara (IKLH) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian IKLH Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persenta Capaian Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	%	2021	84,08	139,21
		2022	79,71	91,05
		2023	80,09	90,91
		2024	77,93	88,21

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
	Target	Realisasi								
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	87,55	79,71	88,10	80,09	88,35	77,93	88,70	-	88,70	-

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Standar Nasional.**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
	Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	Standar Nasional
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,93	75,69	74,30

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ Kegagalan pencapaian Indikator Kinerja:**

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

- Penyebab Penurunan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) disebabkan oleh menurunnya kualitas air sungai dan danau karena beberapa faktor :
 - a. Limbah dari rumah tangga, limbah industri, sampah, penggundulan hutan dan penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan insektisida;

- Penurunan Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) disebabkan beberapa faktor seperti emisi dari kendaraan bermotor, limbah asap industri, kebakaran hutan dan pembakaran sampah;
 - Penurunan Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) disebabkan meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023. dan Pada tahun 2024 nilai IKL tidak mengalami perubahan hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan lagi;
 - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan;
 - Volume sampah yang terus meningkat dan keterbatasan sarana dan prasarana pengangkut sampah dan keterbatasan petugas kebersihan sehingga tidak mampu untuk mengangkut semua sampah yg dihasilkan per hari, sehingga banyak yang membuang sampah ke badan air ataupun membakar sampah sehingga terjadi pencemaran lingkungan;
 - Kewenangan Pemberian sanksi mengikuti tempat diterbitkannya Persetujuan Lingkungan terkadang menjadi kendala untuk menindaki permasalahan yang ada;
 - Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, dunia usaha dalam pengelolaan Ruang terbuka Hijau;
 - Beberapa Pelaku Usaha Pemilik Izin Pengelolaan Limbah B3 kurang proaktif dan tidak rutin melaporkan neraca pengelolaan limbah B3 yang dilakukan.
- Alternative solusi yang telah dilakukan untuk keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja :
- a. Memperkuat sinergi dan kolaborasi Lintas sektor serta bersama-sama dengan bidang Penataan dan Penebatan Lingkungan serta bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan terkait penanganan dan perbaikan kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Membangun komunikasi yang aktif dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Penegakkan Hukum LHK Sulawesi;
 - c. Meningkatkan kegiatan-kegiatan terkait penanaman pohon dan penghijauan agar kab/kota dapat menyeimbangkan kondisi ekologis kota diantaranya yaitu

meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro;

- d. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai komponen IKLH yakni IKA, IKU dan IKL;
- e. Pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan baik kepada Lembaga Masyarakat, Dunia Pendidikan dan Dunia Usaha dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Koordinasi dan pelaporan hasil-hasil pengawasan, penanganan pengaduan, penerbitan sanksi dan penerbitan izin lingkungan dengan KLHK;
- g. Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau;
- h. Melakukan sosialisasi dan memberikan pembinaan kepada Pemilik Izin terkait Pengelolaan Limbah B3.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja :**

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota :
 - Sub Kegiatan Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang
 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota :
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- ✓ Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota :
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi
- c. Program Pengelolaan Persampahan
 - Kegiatan Pengelolaan Persampahan
 - ✓ Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
 - ✓ Sub Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) :
 - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH;
 - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.

B. Indikator Kinerja “Indeks Resiko Bencana”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase indeks kualitas lingkungan hidup daerah adalah :

$$R = H \times \frac{V}{C}$$

Dimana :

R = Risk (Risiko)
H = Hazar (Bahaya)
V = Vulnerability (kerentanan)
C = Capacity (Kapasitas)

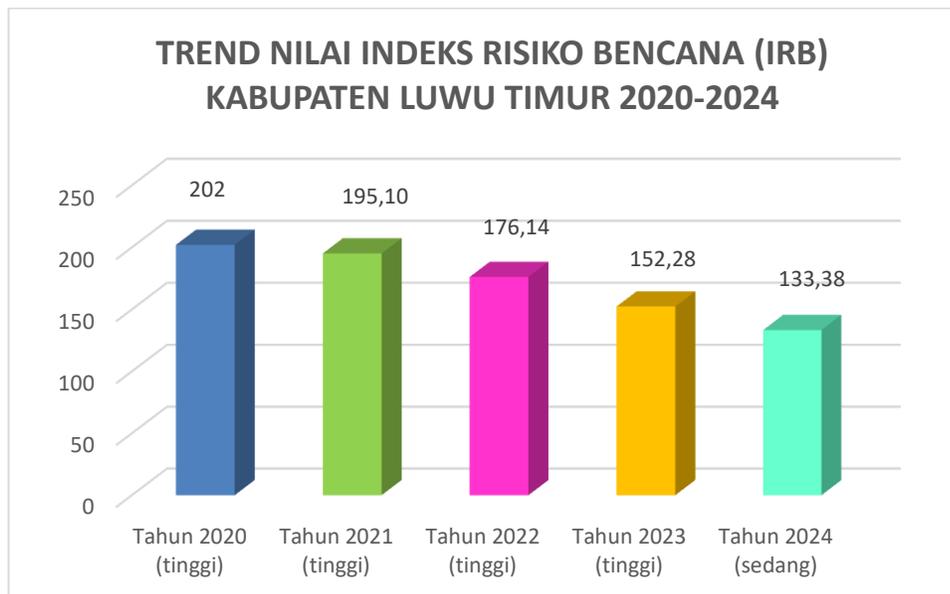
Untuk indikator Indeks Resiko Bencana (IRB) Luwu Timur pada tahun 2024, ditargetkan dengan nilai 152 (tinggi) dengan capaian realisasi kinerja adalah 133,38 (sedang) dengan persentase capaian kinerja sebesar 114%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana target kinerja tahunan yang ditetapkan dengan nilai 202 (tinggi) dengan realisasi kinerja 152,28 (resiko tinggi), IRB tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui BPBD untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. **“Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun”**. Semakin kecil nilai IRBI berarti semakin baik, IRBI yang turun merupakan indikasi adanya investasi di bidang Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Program penanggulangan bencana dapat mengurangi risiko. **IKD dan IRBI menjadi RAPOR bagi Pemerintah Daerah** di bidang penanggulangan bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. **Komponen bahaya** adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. **Komponen kerentanan** adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara **komponen kapasitas** adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana.

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/ kota dilakukan dengan memerhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada. Indeks

Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/kota.

Adapun Trend Nilai Indeks Risiko Bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini :



(Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025)

**Nilai IKD 2024 dan IRB 2024 Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan**

KABUPATEN/KOTA	IKD 2024	IRB 2024
Kepulauan Selayar	0.45	133.58
Bulukumba	0.44	145.59
Bantaeng	Tidak menilai	105.96
Jeneponto	0.24	151.20
Takalar	0.39	125.70
Gowa	0.31	123.85
Sinjai	0.28	165.60
Maros	0.37	149.79
Pangkajene dan Kepulauan	0.37	159.48
Barru	0.51	143.89
Bone	0.56	148.34
Soppeng	0.25	131.20
Wajo	0.56	141.09
Sidenreng Rappang	0.27	119.20
Pinrang	0.48	157.36
Enrekang	0.42	131.10
Luwu	0.36	186.59
Tana Toraja	0.28	150.00
Luwu Utara	0.63	130.32
Luwu Timur	0.65	133.38
Toraja Utara	0.38	143.14
Kota Makassar	0.46	113.71
Kota Pare Pare	0.42	135.00
Kota Palopo	0.57	153.08

(Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025)

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja Indeks Resiko Bencana (IRB) merupakan indikator baru tahun Kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	2021	195.10	-
		2022	182.45	111%
		2023	152,28	133%
		2024	133,38	114%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (Untuk Indikator Kinerja Indeks Resiko Bencana (IRB) merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026).

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi								
1.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	202	176.14	202	152,28	152	133,38	130	-	125	-

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Standar Nasional.**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
	Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	Standar Nasional
Indeks Resiko Bencana (IRB)	133,38 (sedang)	140,76 (sedang)	128,52 (sedang)

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja:**

1. Indeks Resiko Bencana (IRB)

- Penyebab tercapainya target atau turunnya tingkat resiko bencana dari tahun-tahun sebelumnya adalah :
 - Adanya pelaksanaan FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam rangka penurunan Nilai IRB;

- b. Meningkatnya koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Adanya peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana;
 - d. Adanya ketersediaan data dan informasi yang akurat terkait kebencanaan dari OPD terkait;
 - e. Pelaksanaan Program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan Kegiatan kebencanaan di Sekolah-Sekolah;
 - g. Penanggulangan bencana telah menjadi program prioritas kepala daerah yaitu Mitigasi Bencana.
- Alternative solusi yang telah dilakukan :
- a. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi dan Forum Group Discussion Penilaian Indeks Ketahanan Daerah sesuai timeline ;
 - c. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data pendukung dari OPD terkait dalam Penilaian Indeks Ketahanan Daerah untuk memaksimalkan Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana;

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

1. Indeks Resiko Bencana (IRB)

- a. Program Penanggulangan Bencana:
 - Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota:
 - Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana);
 - Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana:
 - Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;

- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana:
 - Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit.
 - Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.
 - b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
 - c. Program Penanganan Bencana
 - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar Rp.7.725.180.135 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.6.826.929.998 atau 88,37% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 11,63%. Artinya daya serap anggaran yang cukup baik dengan realisasi kinerja yang mencapai target, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efektif dan efisien.

Misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik”** dengan tujuan **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani”**. Untuk mencapai misi 4, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandia, Kesehatan, Rumah Sakit, Pendidikan, Perhubungan, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Pertanian dan Bapelitbangda.

Sasaran Strategis 8

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MEWUJUDKANNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI* ” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat	BB (70,01)	BB(75,46)	107,78%
Rata-Rata Capaian Kinerja			107,78%		

A. Indikator Kinerja “*Indeks Reformasi Birokrasi*”.

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Nilai SAKIP Daerah adalah :

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 ditargetkan predikat BB (70,01) dan realisasi kinerja adalah BB (75,46) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 107,78. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja tahunan yang ditetapkan berhasil dicapai atau sehingga naik predikat dari B ke BB. Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah

Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga tren implementasi RB cenderung terjadi penguatan dengan hasil nilai yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Artinya penilaian hasil evaluasi atas penyelenggaraan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada setiap tahunnya mengalami peningkatan nilai yang berarti bahwa seluruh komponen penilaian RB di Kabupaten Luwu Timur sudah menunjukkan progres peningkatan dan kemajuan yang “baik” yaitu pelaksanaan RB sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun pada sasaran RB Tematik perlu perbaikan optimal dan komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General	100	66,83
B.	RB Tematik	20	8,63
C.	Indeks RB	120	75,46
			BB

(Sumber data: Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Thn 2024 Kementerian PANRB)

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	2021	CC (53,57)	-
		2022	CC (57,68)	-
		2023	B (66,54)	100
		2024	BB (75,46)	107,78

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Kinerja Tahunan RPJMD Tahun 2021-2026.

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks RB	CC	CC (57,68)	B	B (66,54)	BB (70,01)	BB (75,46)	BB	-	BB	-

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja dengan daerah lain dan Provinsi Sulawesi Selatan.**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
	Kabupaten Luwu Timur	Kabupaten Luwu Utara	Provinsi Sulawesi Selatan
Indeks Reformasi Birokrasi	BB (75,46)	B (69,77)	A(81,74)

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Melakukan Coaching Clinic Reformasi Birokrasi seluruh PD teknis yang terkait komponen penilaian RB;
- Memperbaiki Indikator Kinerja Utama, Indikator Outpur atas rencana aksi;
- Evaluasi Pelaksanaan RB seluruh PD.

❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan :**

- Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi Nasional (KepmenpanRB nomor 739 Tahun 2023);
- Memastikan target output atas Rencana Aksi mempertimbangkan baseline tahun sebelumnya.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - Reviu Laporan Kinerja;
 - Reviu Laporan Keuangan;
 - Pengawasan Desa;
 - Kerjasama Pengawasan Internal;
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - Pengawasan dengan tujuan tertentu
- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Penataan Organisasi

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
- ✓ Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- a. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota;
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar Rp.5.918.193.340 dengan realisasi sebesar Rp.5.553.173.787 atau 93,83% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 6,17%. Artinya daya serap anggaran yang cukup baik dengan realisasi kinerja yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai target cukup efektif dan efisien dengan melihat realisasi capaian kinerja.

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN* ” dengan 2(dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	A	A (80,4112)**	100
2.	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	BB(70,01)	B(67,77)	96,80
Rata-Rata Capaian Kinerja			98,4%		

Catatan : **): angka sementara

B. Indikator Kinerja “*Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

Hasil Evaluasi Dari Kementerian Dalam Negeri tentang IPKD

Untuk indikator *Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)* pada tahun 2024 ditargetkan predikat A dan realisasi kinerja dengan predikat A (80,4112)** (untuk angka sementara), karena penetapan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan belum ada dirilis sampai dengan saat ini, yang kemudian nilainya akan dirilis pada akhir tahun 2025. Untuk tahun 2021 nilai IPKD Luwu Timur sebesar 80,1614, tahun 2022 sebesar 78,438, dan tahun 2023 80,4112 artinya terjadi peningkatan poin capaian kinerja IPKD dari tahun 2022 ke 2023. Namun untuk perbandingan capaian IPKD tahun 2024 belum ada karena masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.

Adapun tabel Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah
Dengan Kemampuan Keuangan Daerah “Tinggi”
Tahun Anggaran 2023

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten seluruh Indonesia dengan Kemampuan Keuangan Daerah “Tinggi” sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
1.	BANGKA	14,977	20	14,483	20	0,831	15	85,291	Baik	A
2.	JAYAPURA	11,819	19,828	15	20	1,648	15	83,294	Baik	A
3.	MOROWALI	9,046	19,483	14,224	20	3,304	15	81,056	Baik	A
4.	LAMANDAU	14,602	20	15	15	1,446	15	81,047	Baik	A
5.	BALANGAN	12,97	20	15	15	2,718	15	80,688	Baik	A
6.	LUMAJANG	14,059	14,828	15	20	1,532	15	80,419	Baik	A
7.	LUWU TIMUR	13,47	20	15	15	1,941	15	80,411	Baik	A
8.	GIANJAR	13,196	20	14,483	15	2,673	15	80,352	Baik	A
9.	HULU SUNGAI UTARA	13,737	20	14,741	15	1,698	15	80,176	Baik	A
10.	TANAH LAUT	13,335	19,828	15	15	1,483	15	79,645	Baik	A
11.	BANGKA SELATAN	14,74	19,31	14,483	15	0,938	15	79,471	Perlu Perbaikan	B
12.	KUTAI KARTANEGARA	12,001	20	13,19	15	4,267	15	79,458	Perlu Perbaikan	B
13.	SUMBA TENGAH	10,997	20	14,741	15	3,666	15	79,405	Perlu Perbaikan	B
14.	TABALONG	12,25	20	15	15	2,067	15	79,317	Perlu Perbaikan	B
15.	PASER	10,57	20	15	15	2,986	15	78,556	Perlu Perbaikan	B
16.	MALINAU	10,26	18,793	15	15	4,116	15	78,169	Perlu Perbaikan	B
17.	SLEMAN	10,914	20	14,483	15	2,434	15	77,832	Perlu Perbaikan	B
18.	NATUNA	10,313	20	15	15	2,294	15	77,607	Perlu Perbaikan	B
19.	BADUNG	12,214	20	14,483	10	5,658	15	77,355	Perlu Perbaikan	B

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
20.	HULU SUNGAI SELATAN	10,307	20	15	15	1,832	15	77,14	Perlu Perbaikan	B
21.	MALANG	10,348	20	15	15	1,789	15	77,137	Perlu Perbaikan	B
22.	JEMBER	14,943	20	15	15	1,627	10,005	76,575	Perlu Perbaikan	B
23.	BERAU	8,883	19,655	12,931	15	4,995	15	76,464	Perlu Perbaikan	B
24.	SUKABUMI	10,027	19,655	15	15	1,546	15	76,228	Perlu Perbaikan	B
25.	KOTABARU	12,925	20	15	10	2,617	15	75,542	Perlu Perbaikan	B
26.	KATINGAN	9,863	19,483	14,483	15	1,673	15	75,502	Perlu Perbaikan	B
27.	BULUNGAN	9,638	19,655	13,19	15	2,98	15	75,463	Perlu Perbaikan	B
28.	KONAWA KEPULAUAN	11,568	19,828	12,155	15	1,703	15	75,253	Perlu Perbaikan	B
29.	PELALAWAN	11,46	13,966	13,448	20	1,368	15	75,241	Perlu Perbaikan	B
30.	KABUPATEN BANDUNG	12,214	19,828	10,862	15	2,261	15	75,165	Perlu Perbaikan	B
31.	BOJONEGORO	11,716	19,655	14,741	10	3,874	15	74,986	Perlu Perbaikan	B
32.	LAHAT	9,287	19,31	13,707	15	2,462	15	74,766	Perlu Perbaikan	B
33.	BUTON TENGAH	10,577	19,483	13,448	15	1,163	15	74,671	Perlu Perbaikan	B
34.	PASURUAN	8,24	20	14,741	15	1,55	15	74,531	Perlu Perbaikan	B
35.	KUTAI TIMUR	10,382	20	13,448	15	4,989	10,005	73,825	Perlu Perbaikan	B
36.	TANAH BUMBU	9,086	19,655	11,638	15	3,377	15	73,757	Perlu Perbaikan	B
37.	MAMUJU TENGAH	8,906	20	13,707	15	1,087	15	73,7	Perlu Perbaikan	B
38.	MUSI RAWAS UTARA	9,497	20	12,414	15	1,779	15	73,689	Perlu Perbaikan	B
39.	TOLIKARA	10,475	18,621	7,759	20	1,829	15	73,684	Perlu Perbaikan	B
40.	TANGERANG	5,96	19,31	14,224	15	3,962	15	73,456	Perlu Perbaikan	B
41.	SUMBAWA BARAT	9	20	10,603	15	3,216	15	72,82	Perlu Perbaikan	B
42.	MUSI RAWAS	7,209	19,655	14,224	15	1,552	15	72,64	Perlu Perbaikan	B

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
43.	SIDOARJO	4,283	19,655	14,224	15	4,299	15	72,461	Perlu Perbaikan	B
44.	PULANG PISAU	11,63	19,138	10,086	15	1,603	15	72,458	Perlu Perbaikan	B
45.	KEPULAUAN SELAYAR	12,075	20	9,052	15	1,193	15	72,32	Perlu Perbaikan	B
46.	NUNUKAN	11,458	19,655	9,052	15	2,155	15	72,32	Perlu Perbaikan	B
47.	BATANGHARI	6,122	19,483	15	15	1,105	15	71,71	Perlu Perbaikan	B
48.	SUKAMARA	10,389	19,31	9,828	15	2,165	15	71,692	Perlu Perbaikan	B
49.	BEKASI	13,061	15	15	15	3,461	10,005	71,526	Perlu Perbaikan	B
50.	MALAKA	13,544	19,138	2,586	20	0,837	15	71,105	Perlu Perbaikan	B
51.	MURUNG RAYA	8,47	18,621	10,345	15	3,525	15	70,961	Perlu Perbaikan	B
52.	KARIMUN	9,462	19,655	15	10	1,524	15	70,641	Perlu Perbaikan	B
53.	SANGGAU	9,837	14,828	14,483	15	1,43	15	70,577	Perlu Perbaikan	B
54.	BOMBANA	9,348	19,655	15	10	1,28	15	70,283	Perlu Perbaikan	B
55.	KEPULAUAN MERANTI	11,218	18,448	13,966	15	1,158	10,005	69,795	Perlu Perbaikan	B
56.	BARITO UTARA	7,85	20	8,534	15	3,307	15	69,692	Perlu Perbaikan	B
57.	MANGGARAI BARAT	8,61	19,31	10,345	15	1,261	15	69,527	Perlu Perbaikan	B
58.	LAMONGAN	8,333	15	14,483	15	1,513	15	69,329	Perlu Perbaikan	B
59.	KEPULAUAN MENTAWAI	7,784	20	14,741	15	1,477	10,005	69,007	Perlu Perbaikan	B
60.	MALUKU TENGGARA	9,164	19,138	9,31	15	1,261	15	68,873	Perlu Perbaikan	B
61.	HULU SUNGAI TENGAH	7,873	19,655	9,052	15	1,893	15	68,473	Perlu Perbaikan	B
62.	BUTON UTARA	9,129	19,828	8,793	15	0,702	15	68,452	Perlu Perbaikan	B
63.	KUTAI BARAT	10,052	19,655	13,966	5	4,432	15	68,106	Perlu Perbaikan	B
64.	SERUYAN	8,631	19,655	7,759	15	1,796	15	67,84	Perlu Perbaikan	B
65.	BUTON SELATAN	7,334	19,483	14,483	15	1,253	10,005	67,557	Perlu Perbaikan	B

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
66.	KOLAKA	6,492	14,483	14,483	15	1,946	15	67,404	Perlu Perbaikan	B
67.	TAPIN	11,013	20	15	5	0,964	15	66,977	Perlu Perbaikan	B
68.	TAPANULI SELATAN	9,802	19,655	5,948	15	1,555	15	66,961	Perlu Perbaikan	B
69.	BANYUWANGI	8,309	14,655	11,897	15	1,427	15	66,288	Perlu Perbaikan	B
70.	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	10,326	19,655	13,966	15	2,151	5,01	66,108	Perlu Perbaikan	B
71.	MUSI BANYUASIN	14,529	20	14,483	15	1,853	0	65,864	Perlu Perbaikan	B
72.	PANIAI	9,528	18,621	4,655	15	1,448	15	64,252	Perlu Perbaikan	B
73.	BENGKALIS	11,239	20	5,69	10	2,236	15	64,164	Perlu Perbaikan	B
74.	NIAS SELATAN	10,606	19,483	7,759	15	0,983	10,005	63,835	Perlu Perbaikan	B
75.	SUMBA BARAT DAYA	11,655	18,966	2,069	15	0,79	15	63,479	Perlu Perbaikan	B
76.	EMPAT LAWANG	13,451	18,793	10,345	5	0,877	15	63,466	Perlu Perbaikan	B
77.	GRESIK	9,311	15	11,379	10	2,463	15	63,154	Perlu Perbaikan	B
78.	SABU RAIJUA	7,603	14,655	9,31	15	1,083	15	62,651	Perlu Perbaikan	B
79.	MIMIKA	12,289	15	0	15	5,179	15	62,469	Perlu Perbaikan	B
80.	KEDIRI	9,495	19,483	1,81	15	1,665	15	62,453	Perlu Perbaikan	B
81.	SUMBA BARAT	8,44	15	7,241	15	1,207	15	61,889	Perlu Perbaikan	B
82.	MAHAKAM ULU	10,243	9,138	9,569	10	7,091	15	61,041	Perlu Perbaikan	B
83.	KOLAKA TIMUR	10,741	19,138	4,914	15	1,049	10,005	60,847	Perlu Perbaikan	B
84.	KAPUAS	11,486	19,655	7,5	15	2,189	5,01	60,841	Perlu Perbaikan	B
85.	BATU BARA	9,42	19,655	5,948	15	0,749	10,005	60,778	Perlu Perbaikan	B
86.	TANA TIDUNG	5,883	14,483	4,914	15	4,875	15	60,155	Perlu Perbaikan	B
87.	NIAS UTARA	8,189	18,276	12,155	15	0,899	5,01	59,529	Perlu Perbaikan	B

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
88.	HALMAHERA UTARA	13,596	20	4,655	5	0,911	15	59,162	Perlu Perbaikan	B
89.	PULAU MOROTAI	9,415	12,931	0,517	20	1,059	15	58,923	Perlu Perbaikan	B
90.	WAKATOBI	8,401	14,828	4,138	15	1,227	15	58,594	Perlu Perbaikan	B
91.	HALMAHERA SELATAN	10,127	9,828	6,466	15	2,142	15	58,562	Perlu Perbaikan	B
92.	KONAWE UTARA	8,743	13,276	3,362	15	3,171	15	58,552	Perlu Perbaikan	B
93.	PANGANDARAN	9,166	20	12,672	10	0,815	5,01	57,664	Perlu Perbaikan	B
94.	KEPULAUAN SULA	12,212	13,966	0,259	15	0,9	15	57,336	Perlu Perbaikan	B
95.	BOGOR	9,187	15	7,759	20	4,389	0	56,335	Sangat Perlu Perbaikan	C
96.	SARMI	12,083	18,621	7,241	15	2,539	0	55,485	Sangat Perlu Perbaikan	C
97.	HALMAHERA TENGAH	10,523	8,448	6,466	10	4,597	15	55,034	Sangat Perlu Perbaikan	C
98.	DEIYAI	6,633	15	0,259	20	2,019	10,005	53,916	Sangat Perlu Perbaikan	C
99.	PENAJAM PASER UTARA	8,352	15	8,017	15	2,251	5,01	53,631	Sangat Perlu Perbaikan	C
100.	BURU SELATAN	10,152	16,897	4,655	20	1,309	0	53,013	Sangat Perlu Perbaikan	C
101.	ASMAT	12,345	17,759	0	15	2,355	5,01	52,47	Sangat Perlu Perbaikan	C
102.	PULAU TALIABU	10,526	11,724	0	5	2,216	0	29,467	Sangat Perlu Perbaikan	C
103.	MALUKU BARAT DAYA	10,087	0	0	0	0,947	15	26,034	Sangat Perlu Perbaikan	C
104.	MAPPI	6,136	0	0	15	1,921	0	23,057	Sangat Perlu Perbaikan	C
105.	KEPULAUAN ARU	2,206	8,103	0	10	1,516	0	21,826	Sangat Perlu Perbaikan	C
RATA-RATA								68,001		
STANDAR DEVIASI								11,623		

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1(satu) tahun sebelum tahun berjalan. Pengukuran IPKD dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terkait dengan dokumen RPJMD dan RKPD;
2. Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait Dokumen KUA-PPAS dan APBD;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD; dan
4. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi :

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi keuangan daerah; dan
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

C. Indikator Kinerja “*Nilai Akuntabilitas Kinerja*”.

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Nilai SAKIP Daerah adalah :

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2024 ditargetkan predikat BB (70,01) dan realisasi kinerja adalah B (67,77) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 96,80. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja tahunan yang ditetapkan belum berhasil dicapai atau belum bisa naik predikat dari B ke BB, namun demikian untuk komponen nilai/poin

mengalami peningkatan dari 66,51 (tahun 2023) menjadi 67,77 (tahun 2024) naik 1,26 poin dan termasuk salah satu kenaikan paling tertinggi dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga tren implementasi AKIP cenderung terjadi penguatan dengan hasil nilai yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Artinya penilaian hasil evaluasi atas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada setiap tahunnya mengalami peningkatan nilai yang berarti bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kabupaten Luwu Timur sudah menunjukkan progres peningkatan dan kemajuan yang “baik” yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Nilai			
		Bobot	2022	2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,83	20,50	20,64
b.	Pengukuran Kinerja	30	19,01	19,14	19,81
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,02	12,11	12,06
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,40	14,76	15,26
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,82	66,51	67,77
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B

(Sumber data: Hasil evaluasi AKIP Thn 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & RB)

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	2021	A (80,16)	-
		2022	A (78,438)	-
		2023	A (80,411)	100
		2024	A(80,411)**	100**

Capaian Nilai SAKIP Daerah Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Nilai SAKIP Daerah	Predikat	2021	B (61,06)	89,64
		2022	B(64,26)	91,80
		2023	B(66,51)	93,68
		2024	B(67,77)	96,80

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Kinerja Tahunan RPJMD Tahun 2021-2026.

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	A	A (78,438)	A	A (80,411)	A	A (80,411)**	A	-	A	-

**): Angka sementara

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai SAKIP Daerah	BB (70,00)	B (64,26)	BB (71,00)	B (66,51)	BB (70,01)	B (67,77)	BB (70,15)	-	BB	-

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Standar Nasional.**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
	Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	Standar Nasional
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	A (80,411)**	B (75,306)	-
Nilai SAKIP Daerah	B (67,77)	B (69,02)	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Keberhasilan pencapaian sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dipengaruhi oleh:
 - Kapasitas Manajemen SDM pengelolaan keuangan yang lebih responsif dan kerjasama yang baik;
 - Penguatan sistem pengendalian intern dimana dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan setiap triwulan;

- komitmen dan konsisten dalam menjalankan kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran seperti kesesuaian nomenklatur dan pagu program RPJMD dan RKPD, RKPD dan KUA-PPAS, KUAPPAS dan APBD;
2. Faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja akuntabilitas kinerja :
- **Perencanaan Kinerja**
 - a. Sebagian besar rumusan kinerja telah menggambarkan kinerja utama sesuai tingkatannya, namun masih terdapat kinerja yang belum memiliki ukuran kinerja yang cukup untuk menggambarkan kinerja utama yang dimiliki;
 - b. Perjenjangan kinerja telah disusun oleh seluruh PD dengan CSF pada masing-masing tingkatan, namun secara kualitas masih belum sempurna dan belum merata ke setiap PD. Di sebagian PD, pohon kerjanya masih belum mengidentifikasi kinerja *crosscutting*;
 - ❖ **Pengukuran Kinerja**
 - a. Masih ditemukan formulasi indikator kinerja di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) dan cukup yaitu pada sasaran “meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya” dengan indikator sasaran “cakupan penerapan nilai agama dalam masyarakat” dan “cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat”. Formulasi perhitungan serta definisi operasional atas kedua indikator tersebut lebih banyak menjelaskan terkait dengan pelaksanaan kegiatan, yang kurang relevan jika menjadi kinerja pada level Kepala Daerah.
 - ❖ **Pelaporan Kinerja**
 - a. Laporan Kinerja Pemda dan PD telah menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan secara detail per-pencapaian kinerja yang dimiliki. Namun demikian, belum terdapat perbandingannya dengan daerah lain atau nasional untuk indikator kinerja yang sejenis, sehingga belum dapat diperbandingkan kemajuan yang dicapai dengan daerah sekitar maupun nasional;

b. Informasi dalam pelaporan kinerja belum dimanfaatkan secara optimal karena belum seluruh umpan balik dari laporan kinerja ditindaklanjuti dalam rencana aksi tahun berikutnya.

➤ **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 yang telah disampaikan kepada Kementerian PANRB dan telah ditindaklanjuti dengan laporan hasil tindak lanjut oleh PD. Namun, perlu terus diperkuat sehingga perbaikan yang dilakukan tidak hanya sebatas perbaikan dokumen namun dapat memperbaiki pelaksanaan kegiatan sehingga mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja internal yang disignifikan.

❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan:**

A. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

- Melakukan pembahasan tindaklanjut bersama tim APIP Inspektorat agar tidak ada temua yang berulang;
- Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bersama OPD;
- Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan sesuai kebutuhan;
- Melakukan penguatan sistem perencanaan serta pengendalian kinerja dan anggaran untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga target dapat tercapai.

B. Nilai Akuntabilitas Kinerja :

- Mereviu kembali perencanaan kinerja pada tingkat PD secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup, sehingga dapat menjawab kinerja utama PD;
- Menyempurnakan perjenjangan kinerja seluruh PD dengan sepenuhnya mengacu pada prinsip pneyusunan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Serta memastikan bahwa perjenjangan kinerja telah mampu mengidentifikasi kinerja *crosscutting*. Hal tersebut untuk memastikan koordinasi antar PD sehingga mampu mendorong pencapaian kinerja;
- Memastikan setiap indikator kinerja yang ditetapkan diikuti dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang jelas dan relevan. Hal ini untuk

memastikan pengukuran kinerja yang dilakukan telah disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran kinerja dapat diandalkan;

- Meningkatkan kualitas laporan kinerja tingkat Pemda dan PD dengan melengkapi perbandingan capaian kinerja baik tingkat Pemda maupun PD terhadap daerah lain atau nasional untuk melihat kemajuan pembangunan daerah secara regional atau nasional.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

✓ Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
- Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran;
- Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;

- Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota;
 - Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - Pengelolaan Dana Darurat Mendesak
- ✓ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- b. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Standar Harga;
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - Penilaian Barang Milik Daerah;
 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penataan Organisasi
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar Rp.5.596.091.840 dengan realisasi sebesar Rp.5.161.788.506 atau 92,24% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 7,76%. Artinya daya serap anggaran yang cukup baik dengan realisasi kinerja yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK*” dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	IKM Pelayanan SPM	Nilai	98.55	99,13**	100,59%
2.	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	88	87,86	99,84%
Rata-Rata Capaian Kinerja			100,21%		

Catatan: **): angka sementara

A. Indikator Kinerja “*IKM Pelayanan SPM*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh nilai Indeks Pelayanan SPM adalah :

Nilai IKM terhadap dihitung dengan menggunakan nilai “rata-rata Tertimbang” terhadap masing-masing unsur pelayanan, Dalam Perhitungan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan, maka setiap unsur yang dikaji memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = 1 \times X$$

Dimana X adalah jumlah unsur yang dikaji;

$$\text{IKLI} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

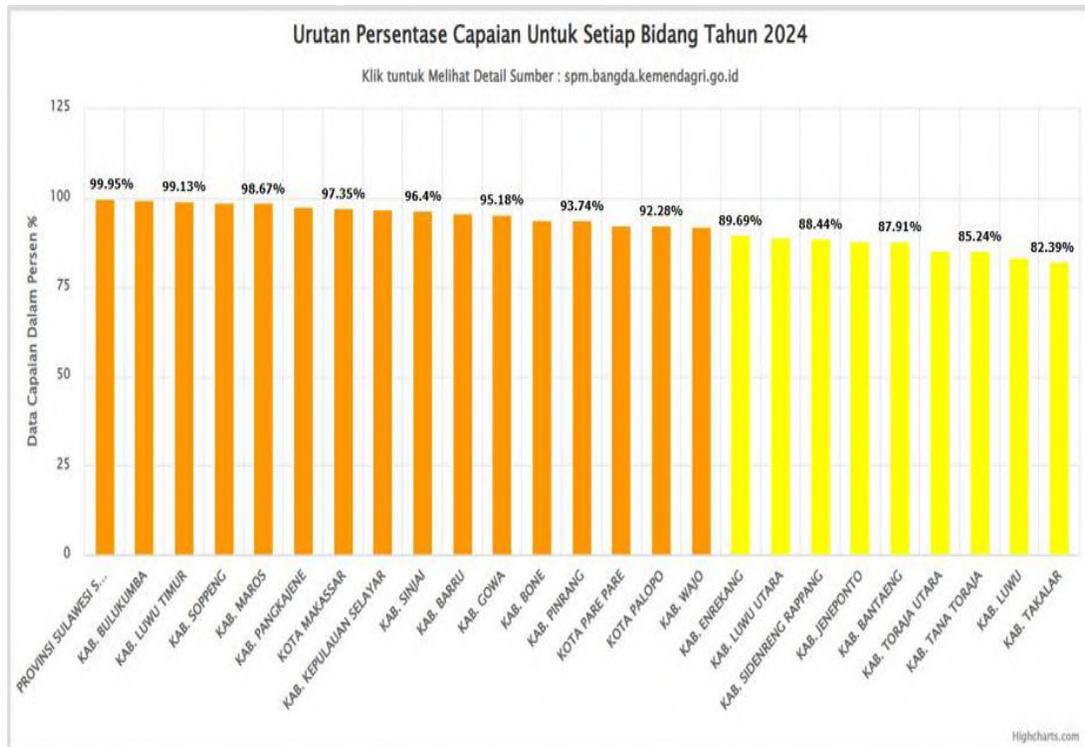
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Layanan} \times 25$$

Keterangan :

Ruang Lingkup IKM antara lain meliputi :

persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk/spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.



Sumber Data : spm.bangda.kemendagri.go.id

Penerapan dan Pencapaian SPM yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 ditargetkan dengan nilai sebesar 98,55 dan realisasi kinerja adalah 99,13 (untuk angka sementara) atau predikat **TUNTAS UTAMA** dengan persentase capaian sebesar 100,59%. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian realisasi kinerja yang melebihi target pada indikator kinerja tersebut. Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM ini merupakan pencapaian tahun ketiga sesuai dengan IKU 2022-2026 Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2024, Hasil penilaian IKM Pelayanan SPM ini untuk ketiga kalinya dilakukan Evaluasi Penerapan SPM berdasarkan e-SPM Secara Nasional yang bersumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik.

IKM merupakan cara untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar kepuasan masyarakat menerima layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah dan keberhasilan pelayanan penyelenggaraan publik, yang dilakukan melalui survei IKM. Selain itu, hal penting yang harus diperhatikan untuk mencapai peningkatan IKM adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana telah diatur dalam UU Nomor 32/2004 Pasal 11 ayat (4) yang menyebutkan "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. SPM merupakan alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata berdasarkan jenis pelayanan, indikator, nilai, dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan. Adapun Bidang urusan yang menjadi target survey IKM adalah :

1. Bidang Urusan Pendidikan;
2. Bidang Urusan Kesehatan;
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat;
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Bidang Urusan Sosial;

B. Indikator Kinerja “IKM Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan “

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Angka Harapan Lama Sekolah adalah :

Nilai IKM terhadap dihitung dengan menggunakan nilai “rata-rata Tertimbang” terhadap masing-masing unsur pelayanan, Dalam Perhitungan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan, maka setiap unsur yang dikaji memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = 1$$

Dimana X adalah jumlah unsur yang dikaji;

$$\text{IKLI} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$\text{IKM Unit Layanan} \times 25$

Keterangan :

Ruang Lingkup IKM antara lain meliputi : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk/spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2024 yang merupakan pencapaian tahun ketiga sesuai dengan IKU Kabupaten 2022-2026 dan perjanjian kinerja ditargetkan dengan nilai 88 dan capaian realisasi sebesar 87,86 dengan persentase capaian 99,84%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tidak tercapai. Adapun tabel perhitungan IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN
TAHUN 2024**

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	4	3	3	4	4	3	4	3	4
2	4	3	4	4	3	4	3	3	4
3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	4	3	3	3	4	4
5	4	3	3	4	3	3	4	4	4
6	3	4	3	4	3	3	4	3	3
7	3	3	3	4	3	3	3	3	3
8	4	3	3	4	3	3	4	4	4
9	3	3	3	4	4	3	3	3	3
10	3	3	3	4	3	4	3	3	4
11	4	3	3	4	4	4	4	4	4
12	3	3	4	4	3	4	4	4	4
13	3	3	4	4	3	3	4	4	4
14	4	3	3	4	4	3	3	3	4
15	3	3	3	4	3	3	3	3	3
16	3	4	4	4	4	4	3	3	4

17	3	3	3	4	3	3	4	4	3
18	4	3	3	4	4	3	3	4	3
19	4	4	3	4	3	3	3	4	3
20	3	3	3	4	3	4	4	3	3
21	4	4	3	4	3	4	3	4	3
22	3	4	4	4	3	4	3	3	3
23	3	3	3	4	3	4	3	4	3
24	4	3	3	4	3	4	3	3	4
25	3	4	3	4	3	4	4	4	3
26	4	4	3	4	3	3	4	3	4
27	3	3	3	4	4	3	4	3	3
28	3	4	3	4	3	3	4	4	3
29	4	4	4	4	3	3	3	3	3
30	3	3	3	4	4	3	4	4	4
31	3	4	3	4	3	3	4	3	4
32	4	3	4	4	3	3	3	3	3
33	3	4	3	4	3	4	3	3	3
34	4	3	3	4	3	3	3	3	3
35	3	3	3	4	3	3	3	3	4
36	4	3	3	4	3	4	3	4	3
37	3	4	3	4	4	3	3	3	4
38	3	4	3	4	3	3	3	3	4
39	4	3	3	4	3	4	3	3	3
40	4	3	3	4	3	3	4	3	4
41	4	3	4	4	3	3	4	3	3
42	4	4	3	4	3	4	4	4	4
43	4	4	4	4	3	4	3	4	4
44	4	4	4	4	4	3	3	3	4
45	4	4	3	4	3	4	3	4	3
46	4	3	3	4	3	4	3	3	4
47	4	3	4	4	3	4	3	4	3
48	3	4	4	4	4	4	3	3	3
49	3	3	4	4	3	3	3	4	3
50	4	3	4	4	3	3	3	3	4
51	4	4	3	4	3	3	4	4	3
52	3	3	4	4	3	3	3	3	4
53	4	3	4	4	3	3	4	3	4
54	4	4	3	4	3	3	4	4	4
55	4	4	4	4	3	4	3	3	4
56	3	3	3	4	4	4	4	4	4

57	4	4	3	4	4	4	3	3	3
58	3	4	3	4	4	3	3	3	4
59	4	3	3	4	4	3	3	3	3
60	3	3	3	4	4	3	4	3	3
61	3	4	4	4	4	4	3	4	4
62	4	3	4	4	4	4	4	4	3
63	4	4	3	4	4	4	3	4	4
64	4	4	4	4	4	3	4	4	4
65	3	4	3	4	4	4	3	4	4
66	3	4	3	4	4	4	3	3	4
67	3	4	3	4	3	4	4	4	4
68	4	4	4	3	3	3	3	3	4
69	4	4	3	4	3	3	3	3	3
70	3	4	3	4	3	3	4	3	4
71	3	3	4	4	4	3	3	4	3
72	4	3	3	4	3	3	3	3	4
73	3	4	3	4	3	4	3	3	3
74	4	3	4	4	3	4	3	4	3
75	4	3	4	3	3	4	4	3	4
76	3	4	3	4	3	3	3	3	4
77	4	3	4	4	3	3	4	3	4
78	4	3	3	4	4	3	4	3	4
79	3	4	3	4	3	3	3	4	3
80	4	3	4	4	3	3	3	3	4
81	4	4	3	4	3	4	4	3	3
82	4	3	4	4	3	3	4	3	4
83	3	4	3	4	4	4	3	4	4
84	4	3	4	4	4	4	3	3	3
85	3	4	3	4	3	4	3	3	4
86	4	3	3	4	3	3	4	3	4
87	3	4	3	4	3	3	3	3	3
88	3	4	3	4	4	4	3	4	4
89	4	3	3	4	3	3	3	3	4
90	3	3	3	4	4	3	4	3	3
91	3	3	3	4	3	3	3	4	3
92	4	4	4	4	3	4	4	4	4
93	3	4	3	4	3	3	3	3	3
94	3	3	3	4	3	3	3	3	4
95	3	4	4	4	4	4	4	4	4
96	3	3	3	4	3	3	3	3	3

97	3	3	3	4	3	3	3	4	4
98	3	3	3	4	3	3	3	3	3
99	4	3	3	4	3	4	3	4	4
100	4	3	3	4	3	3	3	3	4
101	4	3	3	4	3	4	3	3	3
102	3	3	3	4	3	3	3	3	4
103	3	3	3	4	3	4	3	4	4
104	3	3	3	4	4	4	4	3	4
105	4	4	4	4	4	3	3	3	4
106	4	4	3	4	3	4	3	4	3
107	4	3	3	4	3	4	3	3	4
108	4	3	4	4	3	4	3	4	3
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	3	4	3	4	4	4	4	3	3
111	3	4	3	4	3	3	3	4	4
112	3	3	4	4	3	3	4	3	4
113	3	4	3	4	4	3	3	3	4
114	4	4	3	4	4	4	4	4	4
115	4	3	3	4	3	3	4	3	4
116	4	3	4	4	3	3	4	3	3
117	4	4	3	4	3	4	4	4	4
118	3	3	4	4	3	4	3	4	4
119	4	3	3	4	4	4	4	4	3
120	4	3	4	4	3	4	3	4	4
121	4	3	3	4	3	4	4	4	4
122	3	4	3	4	4	3	3	3	4
123	3	4	3	4	3	3	3	3	4
124	3	3	3	4	3	4	3	3	3
125	3	3	3	4	3	3	3	3	4
126	3	3	4	4	3	3	3	3	3
127	3	4	3	4	3	3	4	4	4
128	3	4	3	4	4	4	3	3	3
129	3	4	3	4	4	3	3	4	4
130	4	4	3	4	4	4	4	4	4
131	4	3	3	4	4	3	4	3	4
132	3	4	3	4	4	3	4	3	3
133	3	4	3	4	3	3	3	4	4
134	4	3	4	4	3	3	4	3	4
135	4	3	4	4	4	4	3	3	4
136	3	4	3	4	4	3	3	4	3

137	3	4	4	4	3	4	4	3	4
138	4	4	3	4	3	4	3	4	4
139	4	3	4	4	3	4	3	4	4
140	4	3	4	4	3	3	4	3	4
141	4	4	4	4	3	4	3	4	4
142	4	3	3	4	3	3	4	3	4
143	4	3	3	4	3	3	4	3	3
144	3	4	3	4	3	4	3	3	4
145	3	3	4	4	4	3	3	4	4
146	4	3	3	4	3	4	3	4	4
147	4	3	4	4	4	4	4	4	4
148	3	4	3	4	3	4	4	3	4
149	4	3	3	4	3	4	4	4	3
150	4	3	4	4	3	4	3	4	4
151	3	3	3	4	3	4	3	4	3
152	3	4	3	4	3	3	4	3	4
153	4	3	4	4	3	3	4	3	4
154	3	3	4	4	3	3	3	4	3
155	4	4	4	3	3	3	3	3	4
156	4	3	3	4	3	3	3	3	3
157	3	3	4	4	3	4	3	4	4
158	4	3	3	4	3	3	3	4	4
159	4	3	4	4	3	3	3	4	3
160	4	3	3	4	3	3	3	4	3
161	3	4	3	4	3	3	4	3	4
162	4	3	4	4	4	3	3	3	3
163	3	4	3	4	3	4	3	3	3
164	3	4	3	4	3	4	4	3	4
165	4	3	3	4	3	4	4	4	3
166	4	3	4	4	3	4	3	4	4
167	4	3	3	4	3	3	4	3	3
168	4	3	3	4	3	3	3	3	4
169	4	3	3	3	3	3	4	4	3
170	4	4	3	4	3	4	3	4	4
171	3	4	3	4	3	3	3	3	3
172	4	3	3	4	3	3	4	3	3
173	3	4	3	4	3	4	3	3	4
174	3	3	4	4	4	3	3	4	4
175	3	4	3	4	3	3	4	4	3
176	3	3	4	4	3	4	3	3	4

177	4	3	4	4	3	3	4	3	4
178	4	4	3	4	3	3	4	4	4
179	3	3	4	4	3	4	4	3	4
180	4	3	4	4	4	3	4	4	4
181	3	4	3	4	4	4	3	3	3
182	3	4	3	4	4	3	3	4	4
183	4	3	4	4	4	4	3	3	4
184	3	3	3	4	3	4	3	4	4
185	3	4	4	4	3	3	3	3	4
186	3	4	3	4	3	4	3	3	4
187	3	3	4	4	3	3	3	3	4
188	4	3	3	4	3	4	3	4	4
189	3	4	3	4	3	3	3	3	3
190	4	3	3	4	3	3	3	3	4
191	3	3	3	4	3	3	3	3	4
192	4	4	4	4	3	4	3	4	4
193	3	3	3	4	4	3	4	3	3
194	3	3	3	4	3	4	3	4	4
195	4	3	3	4	4	4	4	3	4
196	4	3	4	4	4	3	4	3	3
197	4	4	3	4	3	3	3	4	3
198	4	3	3	4	3	4	3	4	4
199	3	4	3	4	3	3	3	3	3
200	4	3	3	4	3	4	4	4	3
201	3	3	3	4	3	3	4	3	4
202	3	4	3	4	3	4	3	3	3
203	4	3	4	4	3	3	4	3	4
204	4	4	4	4	3	4	3	4	3
205	4	3	4	4	4	3	4	4	3
206	3	4	3	4	3	3	4	3	4
207	4	3	3	4	3	4	4	4	3
208	4	3	4	4	3	4	3	4	4
209	3	4	3	4	3	3	3	3	4
210	4	3	3	4	3	4	3	3	4
211	4	3	4	4	3	4	3	4	4
212	3	3	3	4	4	4	4	4	3
213	4	3	4	4	3	3	3	3	4
214	3	3	3	4	3	3	3	3	4
215	3	3	3	4	3	3	4	3	4
216	4	3	4	4	4	3	4	4	4

217	3	4	3	4	4	4	3	3	3
218	3	4	3	4	4	3	3	4	4
219	3	3	3	4	4	4	4	4	3
220	4	3	4	4	3	3	3	4	4
221	3	3	3	4	3	3	4	3	3
222	4	4	4	4	3	4	3	4	4
223	3	4	4	4	3	4	3	4	4
224	3	3	3	4	4	3	4	3	3
225	3	3	3	4	3	4	3	4	4
226	4	3	3	4	4	4	4	3	4
227	4	4	3	4	3	3	3	4	3
228	3	3	4	4	3	4	4	4	3
229	4	4	3	4	3	3	3	3	3
230	3	4	3	4	3	3	4	3	4
231	4	3	4	4	3	3	4	3	4
232	3	3	4	4	3	3	3	4	3
233	4	4	3	3	3	3	3	3	4
234	3	3	3	4	3	3	3	3	3
235	3	3	4	4	3	3	3	4	4
236	4	3	4	4	3	3	4	4	3
237	4	3	3	4	3	3	3	3	4
238	3	4	3	4	3	3	4	4	3
239	3	3	4	4	3	4	3	3	4
240	3	3	4	4	3	3	4	3	3
241	4	3	4	4	4	3	3	4	4
242	3	4	3	4	4	4	3	3	3
243	3	4	3	4	4	3	3	4	4
244	3	4	3	4	4	4	4	2	3
245	3	3	3	4	3	3	3	3	4
246	3	3	3	4	4	4	4	4	3
247	4	3	4	4	3	4	3	4	4
248	3	3	3	4	3	3	4	3	3
249	4	4	4	4	3	4	3	4	4
250	4	4	4	4	4	4	4	4	3
251	4	4	3	4	3	3	3	4	3
252	3	3	4	4	3	4	4	4	4
253	4	4	3	4	3	3	3	3	4
254	3	3	4	4	3	4	3	4	4
255	4	3	4	4	3	3	4	3	4
256	4	3	4	4	4	4	3	3	4

257	3	4	3	4	4	3	3	4	3
258	3	4	4	4	3	4	4	3	4
259	4	4	4	4	4	4	4	4	4
260	4	4	4	4	4	4	4	4	4
261	3	3	3	4	3	3	3	3	4
262	3	3	3	4	3	3	4	3	4
263	3	3	3	3	3	3	3	2	4
264	4	4	4	4	4	3	4	4	4
265	3	4	3	4	3	3	4	3	4
266	4	3	3	4	3	3	3	4	3
267	4	3	3	4	3	4	3	3	4
268	3	4	3	4	3	3	4	4	3
269	4	3	3	4	3	4	4	4	4
270	3	3	3	4	3	3	3	3	4
271	4	3	4	4	4	3	3	3	3
272	3	4	3	4	4	3	4	4	4
273	4	3	4	4	3	3	4	3	4
274	3	4	3	4	4	3	4	4	3
275	4	4	4	4	3	3	3	3	3
276	3	3	3	4	3	4	3	4	3
277	4	4	4	4	4	3	3	3	4
278	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	4	3	4	4	3	3	4	4	3
280	3	3	4	4	3	3	3	3	4
281	4	4	3	4	3	4	3	4	3
282	3	4	3	4	3	4	4	4	4
283	4	4	4	3	4	3	3	3	4
284	4	4	3	4	3	3	3	4	3
285	3	4	3	4	4	3	4	3	4
286	4	3	3	4	3	3	4	4	3
287	4	4	4	4	4	4	4	4	4
288	3	4	4	4	4	4	4	4	4
289	4	3	3	4	3	3	3	3	4
290	4	4	3	4	4	3	4	3	3
291	4	4	3	4	3	4	3	4	3
292	4	4	3	4	3	4	3	4	3
293	4	3	4	4	4	4	3	4	3
294	3	4	4	4	4	3	3	3	3
295	4	4	4	4	3	3	4	3	4
296	4	3	4	4	4	3	3	4	4

297	4	3	4	4	4	4	4	4	3
298	3	4	3	4	3	4	3	4	3
299	3	4	3	4	4	3	4	4	3
300	4	4	4	4	3	3	3	4	3
301	3	3	3	4	3	4	3	4	3
302	3	4	4	4	4	3	3	3	4
303	4	3	4	4	3	3	4	3	4
304	4	4	3	4	4	4	3	4	3
305	4	4	3	4	3	3	4	3	3
306	3	3	3	4	4	3	4	4	4
307	3	4	4	4	4	3	3	4	4
308	3	4	3	4	4	4	3	3	3
309	4	4	3	4	4	3	4	4	3
310	4	4	4	4	3	4	4	3	3
311	3	4	4	3	4	4	3	4	4
312	4	3	4	4	3	3	4	4	3
313	4	3	3	4	3	3	3	3	4
314	3	4	3	4	3	3	4	4	3
315	3	3	4	4	3	4	3	3	4
316	4	3	4	4	3	3	4	3	4
317	4	4	4	4	3	3	4	4	4
318	4	4	3	4	3	3	3	3	3
319	3	3	3	4	3	4	3	4	3
320	4	4	3	4	3	3	4	3	4
321	4	3	4	4	3	3	4	3	4
322	4	3	4	4	3	4	3	4	3
323	4	4	4	3	3	3	3	3	4
324	4	3	3	4	3	3	3	3	3
325	3	3	4	4	3	4	3	4	4
326	4	3	3	4	3	3	3	4	4
327	4	4	4	4	3	3	3	4	3
328	4	3	4	4	3	3	3	4	3
329	3	3	4	4	4	3	4	4	3
330	4	3	3	4	3	3	3	3	4
331	3	4	3	4	3	4	3	3	3
332	4	3	4	4	3	4	3	4	3
333	4	3	4	3	3	4	4	4	4
334	3	4	3	4	3	3	3	3	4
335	4	4	4	4	3	3	4	4	4
336	4	3	4	4	4	3	4	3	4

337	4	4	3	4	3	3	4	4	3
338	4	3	4	4	3	4	4	3	4
339	4	3	4	4	3	4	3	4	3
340	3	4	3	4	4	4	3	4	4
341	4	3	4	4	3	3	4	4	3
342	4	3	3	4	4	3	4	3	4
343	3	4	3	4	3	3	4	4	3
344	3	4	4	4	3	4	3	4	4
345	4	3	4	4	3	3	4	4	4
346	4	3	4	4	4	3	3	3	4
347	4	3	3	4	3	4	4	4	4
348	3	4	3	4	4	3	3	3	4
349	4	4	3	4	3	3	4	3	4
350	4	3	3	4	3	4	3	3	3
351	4	4	4	4	3	4	3	4	4
352	4	3	4	4	3	3	4	3	3
353	3	4	3	4	4	4	3	3	3
354	3	4	3	4	4	3	4	4	4
355	4	4	3	4	4	4	4	4	4
356	4	3	4	4	4	4	4	3	4
357	4	4	3	4	4	4	4	3	3
358	4	4	3	4	3	4	4	4	4
359	4	3	4	4	4	3	4	3	4
360	4	3	4	4	4	4	4	3	4
361	3	4	3	4	4	3	4	3	3
362	4	4	3	4	4	4	3	4	4
363	4	4	4	4	4	4	4	3	4
364	4	4	4	4	4	4	4	4	3
365	4	4	3	4	3	4	3	4	3
366	3	4	4	4	3	4	4	4	4
367	4	4	3	4	4	3	4	3	4
368	4	4	3	4	3	4	4	4	3
369	3	4	4	4	4	4	3	4	4
370	4	3	4	4	3	4	3	4	3
ΣNilai /Unsur	1315	1278	1256	1470	1226	1272	1269	1286	1331
NRR / unsur	3,554	3,454	3,395	3,973	3,314	3,438	3,430	3,476	3,597
NRR tertbg/	0,395	0,384	0,377	0,441	0,368	0,382	0,381	0,386	0,400

*)

unsur									3,514
									**)
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan									87,86

	No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
Keterangan :	U1	Persyaratan	3,554
- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan	U2	Prosedur	3,454
- NRR = Nilai rata-rata	U3	Waktu pelayanan	3,395
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat	U4	Biaya/tarif	3,973
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang	U5	Produk layanan	3,314
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25	U6	Kompetensi pelaksana	3,438
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi	U7	Perilaku pelaksana	3,430
Jumlah kuesioner yang terisi	U8	Sarana dan Prasarana	3,476
NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111	U9	Penanganan Pengaduan	3,597
per unsur			
IKM UNIT PELAYANAN (hasil konversi) :		87,86	= Baik
Mutu Pelayanan :			
A (Sangat Baik) :	88,31 - 100,00		
B (Baik) :	76,61 - 88,30		
C (Kurang Baik) :	65,00 - 76,60		
D (Tidak Baik) :	25,00 - 64,99		

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian IKM Pelayanan SPM Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM merupakan indikator baru tahun ketiga pada IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
IKM Pelayanan SPM	Nilai	2021	-	-
		2022	91,65	111,20%
		2023	98,49	116,21%
		2024	99,13**	100,59%

Catatan: **): angka sementara

Capaian IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut. (Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan indikator baru tahun ketiga pada IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	2021	-	-
		2022	87,80	106,80%
		2023	87,84	104,19%
		2024	87,86	99,84

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026. (Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM merupakan indikator baru tahun ketiga pada IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi								
1.	IKM Pelayanan SPM	82,42	91,65	84,75	98,49**	98,55	99,13**	98,91	-	99	-

Catatan: **): angka sementara

(Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan indikator tahun ketiga pada IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:)

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi								
1.	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	82,21	87,80	84,31	87,84	88	87,86	90	-	92	-

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Standar Nasional.**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
	Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	Standar Nasional
IKM Pelayanan SPM	99,13**	99,95	-
IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	87,86	-	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

A. *IKM Pelayanan SPM :*

1. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal,
2. Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang memadai,
3. Penempatan tenaga pendidik dilakukan secara merata,
4. Peningkatan KIE kepada ibu hamil, sehingga melahirkan di fasilitas Kesehatan.
5. Penyediaan sarana mobilitas untuk menjemput dan mengantar pulang ibu yang bersalin di puskesmas.
6. Bidan desa yang aktif melakukan kunjungan rumah balita yang tidak datang ke posyandu.
7. Dukungan Anggaran yang sangat baik dalam memacu pelayanan spm
8. Dukungan Personil pada bidang yang menangani Penyediaan kebutuhan pokok Air minum dan Penyediaan pengelolaan air limbah domestik
9. Penanganan yang tanggap terhadap sarana SPAM yang mengalami kerusakan akibat bencana,
10. alokasi anggaran untuk pendataan cukup maksimal, sehingga identifikasi yang dilakukan bersifat makro.
11. Untuk Capaian dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan berasal dari pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan peserta sebanyak 250 org, Penyampaian informasi melalui PUSDALOPS BPBD, Penyebaran informasi melalui FB, IG 1.895 org, Penyampaian informasi melalui Papan himbauan informasi bencana dan rambu-rambu peringatan bencana yang ditempatkan di 10 kecamatan yang berpotensi tersampaikan kepada 274.359 org dengan akumulasi secara keseluruhan sebesar 276.254 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 302.039 jiwa (baseline data). Capain yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 3 kecamatan yang belum memiliki papan himbauan peringatan dini bencana karena kondisi papan himbauan yang sebelumnya rusak berat,

12. Capaian dari Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berasal dari pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (Pelatihan TRC) sebanyak 43 org, pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi sebanyak 50 org, pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 250 org. Selain itu terdapat penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Alat Ina TEWS untuk mendeteksi gempa bumi yang berpotensi tsunami yang disebabkan oleh sesar-sesar dari luar Kab. Luwu Timur. Alat ini ditempatkan di kantor BPBD Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah 302.039 jiwa (baseline data) memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.
13. Capaian dari Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui perhitungan jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2023 sebanyak 1.283 jiwa (633 laki-laki dan 650 perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi.
14. Adanya kegiatan pendataan khusus target penerima layanan SPM dan intensifnya anggaran yang ada untuk mendukung tercapainya target SPM.

B. IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

1. Kualitas pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan SP;
2. Kompetensi pegawai yang menyelenggarakan pelayanan telah memadai;
3. Fasilitas yang memadai;
4. Transparansi dan akuntabilitas yang jelas terhadap SOP dan SP.
5. Adanya peningkatan pelayanan perizinan karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan kemampuan pelayanan Petugas yang ramah dan ruangan pelayanan yang nyaman sehingga masyarakat/pelaku usaha merasa nyaman dan puas, dengan aplikasi OSS sehingga memberi kemudahan dalam pengurusan Izin menyebabkan percepatan waktu dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan lebih singkat;
6. Kepekaan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan transparan.

❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan :**

A. IKM Pelayanan SPM:

1. Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai Standar pelayanan minimal pada jenjang TK/ PAUD, SD, dan SMP dengan mengalokasikan/menambah anggaran dibidang Pendidikan,
2. Pemenuhan perlengkapan dasar PAUD perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram,
3. Perlunya pendataan tenaga pendidik dan kependidikan sehingga dapat diperoleh data yang akurat untuk pemerataan guru pada satuan pendidikan,
4. Pemberian upah guru yang masih berstatus honorer untuk semua jenjang,
5. Memberikan pelatihan kepada guru melalui kegiatan KKG, MGMP dan Pelatihan Tutor untuk jenjang kesetaran,
6. Bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik jenjang TK, SD dan SMP melalui dana BOP dan BOS,
7. Bantuan seragam sekolah untuk peserta didik baru pada jenjang SD dan SMP,
8. Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang PAUD/TK, SD, SMP dan Kesetaraan,
9. Pencegahan perkawinan usia dini dan Peningkatan KIE tentang Kesehatan reproduksi pada remaja
10. Pendampingan 1000 HP, mulai dari ibu hamil sampai bayi berusia 2 tahun oleh bidan, jadi semua bidan harus ada ibu hamil/bayi yang didampingi.
11. Pemberdayaan kader untuk menggerakkan masyarakat yang punya balita agar dibawa ke posyandu setiap bulannya.
12. Pengadaan strip kolesterol sesuai jumlah warga lanjut usia
13. Dukungan anggaran perlu ditingkatkan
14. Diperlukan tambahan personil pada bidang yang menangani SPM
15. Diperlukan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pemeliharaan atau perawatan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun
16. Diperlukan dukungan BBWS dan BPPW untuk penanganan aset bangunan SPAM yang penanganannya merupakan kewenangan BBWS dan BPPW Provinsi Sulawesi Selatan

17. Perlu dilakukan identifikasi lokasi bencana lebih detail terhadap lokasi-lokasi rawan bencana yang telah ditetapkan.
18. Perlu dilakukan pembuatan baseline lokasi rawan bencana
19. Melakukan Koordinasi dengan TPAPD kab. Luwu Timur dan mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka pemenuhan peningkatan mutu layanan SPM Trantibum;
20. Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Hibauan Peringatan Dini dan Media Sosial,
21. Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
22. Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.
23. Melakukan pengumpulan data base ditingkat dusun,
24. Memaksimalkan pendampingan desa terkait pelaksanaan Mitigasi Bencana di tingkat desa melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dan Dana Desa,
25. Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan,
26. Memaksimalkan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya,
27. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG,
28. Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan,
29. Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana,
30. Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur,
31. Melakukan koordinasi dan konsultasi pada dirjen bina pembangunan daerah terkait indikator dan capaian kinerja SPM;
32. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya Satpol PP untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
33. Membentuk UPTD Satpol PP kecamatan,
34. Memenuhi Sarana dan Prasarana secara bertahap
35. Diperlukan pengadaan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki, minimal 1 unit mobil Damkar untuk 1 Kecamatan, yang sampai saat ini masih ada 2 Kecamatan dari 11

Kecamatan di Kab. Luwu Timur yang belum memiliki WMK/ posko Damkar dan Penyelamatan yaitu Kec. Nuha dan Kec. Mangkutana, Juga pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas, dan peningkatan sumber daya aparatur pemadam kebakaran, dimana sangat disadari bahwa untuk mencukupi semua itu tentunya diperlukan anggaran yang besar

36. Pelaksanaan pendataan PPKS Target SPM;
37. Pengusulan penambahan anggaran pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

B. IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:

1. Mengembangkan inovasi inovasi yang diharapkan akan mampu memberi kemudahan bagi masyarakat dalam hal ini pengurus izin, seperti inovasi si Kumiz yang saat ini sedang di aplikasikan dalam proses perizinan dan non perizinan;
2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan konsultasi secara offline maupun online;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai;
4. Penguatan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan melakukan pelatihan dan konsultasi.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

A. IKM Pelayanan SPM:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Program Pendidikan Non Formal;
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
10. Program Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota;

11. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
12. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Program Penanggulangan Bencana;
14. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
15. Program Rehabilitasi sosial;
16. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

B. IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.252.752.195.011 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.238.044.476.000 atau 94,18% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 5,82%. Artinya daya serap anggaran yang cukup baik dengan realisasi kinerja yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efektif dan efisien.

Misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Seluruh Warga Masyarakat dengan tujuan “Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Norma Ketertiban dan Ketentraman “**. Untuk mencapai misi 5, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidang ketertiban dan ketentraman, pemadam kebakaran dan penyelamatan dan kesatuan bangsa dan politik.

Sasaran Strategis 11

Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*TERPELIHARANYA RASA AMAN DAN DAMAI DALAM MASYARAKAT*” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Nilai	85,56	88,59	103,54%
Rata-Rata Capaian Kinerja			103,54%		

B. Indikator Kinerja “*Indeks Ketertiban dan Ketentraman*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase cakupan kinerja ketentraman dan ketertiban umum adalah :

Indikator indeks ketertiban dan ketentraman dibentuk oleh nilai rata-rata :

1. Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara;
2. Persentase standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Persentase Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten;

4. Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (%);
5. Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (%)

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Ketertiban dan Ketentraman} &= \text{Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah} + \text{Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar} \\
 &= 11,09 + 77,50 \\
 &= 88,59
 \end{aligned}$$



Untuk indikator kinerja tahunan Indeks Ketertiban dan Ketentraman Pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 85,56 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 88,59 dan persentase capaian kinerja 103,54%. Artinya menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Indikator Kerja Utama (IKU) Kabupaten 2022-2026. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, dimana target kinerja tahunan sebesar 76,81 dan realisasi capaian sebesar 81,67 dengan persentase capaian kinerja 106,33, terjadi peningkatan capaian kinerja..

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Kinerja *Indeks Ketertiban dan Ketentraman* Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Indikator ini merupakan capaian tahun ketiga berdasarkan IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan capaian target dan realisasi tahun sebelumnya). dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Nilai	2021	-	-
		2022	59,82	77,97%
		2023	81,67	106,33%
		2024	88,59	103,54%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi								
1	Indeks Ketertiban dan ketentraman	76,72	59,82	76,81	81,67	85,56	88,59	90	-	95	-

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Standar Nasional.**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024		
	Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	Standar Nasional
Indeks Ketertiban dan ketentraman	88,59	-	-

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ✓ Pengawasan dan evaluasi, Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin kepada para aparatur Satpol PP dalam memberikan tugas pelayanan trantibum kepada masyarakat sangat efektif dalam mencegah terjadinya dampak akibat dari penegakan perda/perkada dilapangan.
- ✓ Pengawasan dan penindakan, Pengawasan yang secara rutin dilakukan di titik-titik rawan gangguan trantibum oleh pelaksana Satpol PP kecamatan sangat efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran trantibum yang kemudian dilakukan penindakan yang sesuai aturan untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelanggar;
- ✓ Peningkatan Koordinasi antara satlinmas tingkat desa/kelurahan dengan Satpol PP. Dengan adanya koordinasi yang baik, peran satlinmas dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat dioptimalkan.
- ✓ Pemanfaatan media sosial dalam menyebarkan informasi -informasi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sehingga masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi

dalam melaporkan adanya pelanggaran dan memberikan kritik dan saran untuk peningkatan kinerja Satpol PP;

- ✓ Peranan PPNS dalam penyelesaian kasus Pelanggaran Perda/Perkada;

❖ **Alternative Solusi Yang dilakukan :**

- ✓ Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar melalui Pendidikan dan Pelatihan. PNS pelaksana Satpol PP diikutkan untuk Diklat Jabatan Fungsional Pol PP dan Diklat PPNS bagi PNS yang memenuhi syarat;
- ✓ Anggota Satpol PP Non-PNS (upah jasa) diberikan program pelatihan-pelatihan kepomongprajaan agar dapat meningkatkan kemampuan membantu tugas pokok Satpol PP dalam penegakan Perda;
- ✓ melakukan monitoring terkait keterlibatan Satlinmas dalam pelaksanaan tugasnya dan berkoordinasi dengan Kepala Desa;
- ✓ Pembukaan Wilayan Manajemen Kebakaran (WMK) untuk daerah kecamatan yang belum memiliki WMK.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
 - b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massal;
 - c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;

- f. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman umum dan ketertiban masyarakat;
- g. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara;
 - Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - b. Pengawasan dan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - c. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS
- ✓ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
- ✓ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- ❖ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.13.834.219.900 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.13.319.594.425 atau 96,28% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 3,72%. Artinya daya serap anggaran yang cukup baik dengan realisasi kinerja yang sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran sangat efektif dan efisien.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada era otonomi daerah, akuntabilitas menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi untuk mewujudkan **“good governance** sekaligus **clean government”**. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 11 sasaran strategis dengan 23 indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran rata-rata capaian kinerja dan persentase realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.1
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	100,26%	96,52%	3,48%
2.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan	98,26%	64,47%	35,53%
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	96,18**%	83,60%	16,40%
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	156,25%	87,14%	12,86%
5.	Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha	61%	69,06%	30,91%
6.	Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	104,67%	81,83%	18,17%
7.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	101,105%	88,37%	11,63%
8.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani	107,78%	93,83%	6,17%
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	98,4%	92,24%	7,76%
10.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100,21%	94,18%	5,82%
11.	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat	103,54%	96,28%	3,72%

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp. 2.241.552.125.387,05 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.065.705.159.245,29 atau 922,16%, berdasarkan data hasil audit BPK. Adapun rincian PAD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.1
Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD
Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(RP)	(RP)	%
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	365.683.777.307,00	391.984.655.348,56	107,19
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	219.905.665.243,23	258.003.775.011,00	103,41
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	3.802.736.750,00	2.717.719.580,00	57,58
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	24.705.244.836,00	24.705.244.836,00	100,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.270.130.477,77	106.557.915.921,56	90,87

Sumber : BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Aspek Pendapatan Daerah

Hingga akhir tahun 2024, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.391.984.655.348,56 atau melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.365.683.777.307,00 atau mencapai 107,19%. Dari jumlah realisasi pendapatan daerah tersebut, masing-masing kelompok pendapatan daerah memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Realisasi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 258.003.775.011,00 atau sebesar 103,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 219.905.665.243,23;
2. Realisasi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.717.719.580,00 atau sebesar 57,58 dari target yang direncanakan yakni sebesar Rp. 3.802.736.750,00;
3. Realisasi Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Sebesar Rp. 24.705.244.836,00 atau sebesar 100,00 % dari target yang ditetapkan 24.705.244.836,00.
4. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 106.557.915.921,56 atau 90,87% dari target sebesar Rp. 117.270.130.477,77.

Aspek Belanja Daerah

Tabel III.2
 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
 Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp	Rp	
5.1.	Belanja Operasi	1.382.845.496.017,00	1.272.625.726.211,16	92,03
5.2	Belanja Modal	379.369.697.356,00	319.096.000.310,88	84,11
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	618.000.000,00	41,20
5.4	Belanja Transfer	357.793.542.612,29	357.727.169.543,69	99,98
6.1	Penerimaan Pembiayaan	103.570.143.179,56	103.570.143.179,56	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	16.473.246.222,20	12.068.120.000,00	73,26
	Jumlah	2.241.552.125.387,05	2.065.705.159.245,29	92,16

Sumber : BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

D. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Di tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

1. Luwu Timur Sabet Penghargaan Best Economic Development 2024

CNN Indonesia

Jumat, 22 Mar 2024 08:15 WIB

Bagikan:    



Kabupaten Luwu Timur menerima penghargaan Best Economic Development 2024 dalam CNN Indonesia Awards. (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim)

2. Budiman Terima Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Publik dari Ombudsman

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan memberikan penghargaan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 kategori zona hijau kepada Pemerintah

General, News, Pemerintahan 🕒 Desember 12, 2024



3. Kabupaten Luwu Timur Juara 1 pada Ajang SSIC Tahun 2024

Agustus 15, 2024 — 9.861 views



Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Kabupaten Luwu Timur berhasil menjadi Juara 1 dalam Ajang South Sulawesi Investment Challenge (SSIC), yang dilaksanakan di Hotel Fourpoint by Sheraton Makassar, Rabu (14/08/2024).

4. TP PKK Lutim Borong 3 Penghargaan pada Peringatan HKG PKK Sulsel

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur sukses memborong 3 Kategori Juara pada Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK) ke –

General, News, Pemerintahan 🕒 Oktober 25, 2024



5. Dua Desa di Luwu Timur Masuk 10 Besar Lomba Desa Ketahanan Pangan Sulsel

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Dua desa di Kabupaten Luwu Timur, yakni Desa Kertoraharjo di Kecamatan Tomoni Timur dan Desa Kalatiri di Kecamatan Burau, berhasil masuk

General, News, Pemerintahan 🕒 Oktober 9, 2024



6. Sukses Terapkan SRIKANDI, Kabupaten Luwu Timur Terima Penghargaan dari ANRI

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Kabupaten Luwu Timur kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan menerima penghargaan/apresiasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan

General, News, Pemerintahan 🕒 September 4, 2024



7. Pemkab Lutim Raih Penghargaan Daerah Coverage Tertinggi di Paritrana Award 2023 tingkat Sulsel

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) meraih penghargaan sebagai daerah dengan Coverage Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tertinggi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

General, News, Pemerintahan 🕒 Agustus 12, 2024



8. Pemkab Luwu Timur Terima Penghargaan UHC untuk Ketiga Kalinya

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali meraih prestasi di tingkat Nasional. Kali ini daerah berjuluk Bumi Batara Guru ini mendapat penghargaan Universal

General, News, Pemerintahan 🕒 Agustus 10, 2024



9. Lutim Terima Penghargaan Proklim Kedua Kalinya dan Satu-Satunya di Luwu Raya

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dianugerahi Penghargaan Apresiasi Pembinaan ProKlim tingkat Kabupaten Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center Hall B,

General, News, Pemerintahan 🕒 Agustus 10, 2024



10. Bupati Luwu Timur Terima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa dari Kemenkumham RI

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Bupati Luwu Timur, H. Budiman kembali mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini Bupati menerima apresiasi penghargaan dari Kementerian Hukum dan

General, News, Pemerintahan 🕒 Juni 15, 2024



11. Kabupaten Luwu Timur Raih Penghargaan Peduli HAM dengan Nilai Tertinggi Kedua se-Sulsel

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id-Kabupaten Luwu Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih sebuah penghargaan bergengsi yakni Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2023.

General, News, Pemerintahan 🕒 Maret 26, 2024



12. Kabupaten Luwu Timur Sukses Raih Penghargaan Adipura yang Kedelapan

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Kabupaten Luwu Timur khususnya Kota Malili kembali sukses meraih penghargaan Adipura Tahun 2023 dengan kategori Kota Kecil. Ini merupakan penghargaan yang

General, News, Pemerintahan 🕒 Maret 5, 2024



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian 11 (sebelas) sasaran dengan 15 (limabelas) indikator kinerja diperoleh rata-rata pencapaian keseluruhan adalah sebesar **102,51%**. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari upaya-upaya optimal dan berkelanjutan yang dilakukan seluruh Perangkat Daerah untuk mampu berkinerja yang berorientasi pada hasil (result oriented government) yang berdampak nyata ke masyarakat.

Untuk lebih jelas, berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	100,26%
2.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan	98,26%
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	96,18%**
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	156,25%
5.	Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan lapangan Usaha	61%
6.	Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	104,67%
7.	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	101,105%
8.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani	107,78
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	98,4%
10.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100,21%
11.	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat	103,54%
Rata-Rata Pencapaian Sasaran		102,51%

B. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Terhadap kondisi capaian kinerja tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu dilakukan adalah :

1. Menyempurnakan perencanaan kinerja pada tingkat Perangkat Daerah (PD) secara menyeluruh untuk memastikan seluruh sasaran strategis berorientasi hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup, sehingga dapat menjawab kinerja utama PD;
2. Menyempurnakan perjenjangan kinerja seluruh PD dengan sepenuhnya mengacu pada prinsip penyusunan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, serta memastikan bahwa perjenjangan kinerja telah mampu mengidentifikasi kinerja *crosscutting* untuk memastikan koordinasi antar PD sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja;
3. Memastikan setiap indikator kinerja yang ditetapkan diikuti dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang jelas dan relevan, untuk memastikan pengukuran kinerja yang dilakukan telah disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran kinerja dapat diandalkan;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada tingkat Pemda dan PD dengan melengkapi perbandingan capaian kinerja baik tingkat Pemda maupun PD terhadap daerah lain atau nasional yang dapat diperbandingkan, untuk melihat kemajuan pembangunan daerah secara regional dan nasional;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja sebagai bahan masukan dalam perencanaan kinerja selanjutnya, baik dalam penentuan target agar lebih menantang dan realistis maupun dalam penentuan strategi yang akan diputuskan agar lebih tepat dalam mendorong kinerja yang telah ditetapkan;
6. Meningkatkan kualitas evaluasi internal terhadap PD dengan memastikan bahwa tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi tidak hanya memperbaiki dokumen perencanaan, namun mampu mendorong perbaikan pada pelaksanaan pada program dan kegiatan PD.
7. Melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan dan program dalam mencapai target.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur akan terus berbenah diri, melakukan perbaikan terhadap kelemahan/kekurangan serta kegagalan yang pernah diperoleh menjadi pengalaman sebagai bahan evaluasi serta masukan untuk keberhasilan dan kesuksesan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Malili, 19 Maret 2025



BUPATI LUWU TIMUR,

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR INSPEKTORAT

Jl. Soekarno-Hatta No. TELP. (0474) 321455 FAX. (0474) 321455
MALILI, 92981

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah di tetapkan.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Malili, 19 Maret 2025

INSPEKTUR KABUPATEN,


SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 198903 1 007